

SKRIPSI

**DINAMIKA POLITIK KEDATUAN SUPPA PASCA ISLAMISASI
ABAD XVII**



OLEH

**MUH. ARDIANSYAH
NIM. 2220203880230001**

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2026 M/1448 H**

**DINAMIKA POLITIK KEDATUAN SUPPA PASCA ISLAMISASI
ABAD XVII**



OLEH

**MUH. ARDIANSYAH
NIM. 2220203880230001**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)
pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2026 M/1448 H**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Dinamika Politik Kedatuan Suppa Pasca
Islamisasi Abad XVII

Nama Mahasiswa : Muh. Ardiansyah

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203880230001

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
B- 2238 /In.39/FUAD.03/PP.00.9/9/2025

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

: Dr. Ahmad Yani, M. Hum (.....)

NIP

: 199406132020121011

Mengetahui :

Dekan,

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Dinamika Politik Kedatuan Suppa Pasca
Islamisasi Abad XVII

Nama Mahasiswa : Muh. Ardiansyah

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203880230001

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
B- 2238 /In.39/FUAD.03/PP.00.9/9/2025

Tanggal Kelulusan : 13 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Ahmad Yani, M. Hum (Ketua)

Dr. A. Nurkidam, M. Hum (Anggota)

Saidin Hamzah, M. Hum (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui :

Dekan

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dr. H. Muhiddin Bakri, Lc., M.Fil.I.P.
NIP.19760713 200912 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis hanjatkan kehadiran Allah SWT. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini yang berjudul “Dinamika Politik Kedatuan Suppa Pasca Islamisasi Abad XVII.” Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sejarah Peradaban Islam (S. Hum.) pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Suri Teladan Baginda Agung Nabi Muhammad Saw.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, penulis sampaikan kepada Kedua orang tua tercinta, Ismail Muhtar dan Ibunda Mariana Janna, yang dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan doa yang tidak pernah terputus, selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah penulis. Terima kasih karena telah menjadi mata untuk melihat, kaki untuk melangkah, serta tangan untuk menggapai bagi penulis. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Ibu Dr. Zulfah, S. Pd., M. Pd. Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Ibu Nurhikmah, M. Sos. I. selaku Wakil Rektor II Bidang Akademik Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Dr. Kaharuddin, S. Ag., M. Pd. I. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan serta mengembangkan kemampuan akademik selama masa perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Muhiddin Bakri, Lc., M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Bapak Dr. Ahmad Yani, M. Hum selaku Dekan I Bidang AKKK, serta Bapak Dr. H. M. Ihsan Darwis, M. Si selaku Wakil Dekan II Bidang AUPK. yang telah menciptakan lingkungan akademik yang kondusif sehingga proses pendidikan dapat berjalan dengan baik.

3. Bapak Saidin Hamzah, M.Hum. selaku Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam yang senantiasa memberikan arahan, pembinaan, motivasi, dan semangat kepada seluruh mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani, M.Hum. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, kritik, serta motivasi kepada penulis sejak awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare, khususnya dosen Program Studi Sejarah Peradaban Islam, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan wawasan selama penulis menempuh pendidikan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh tenaga kependidikan di lingkungan rektorat, fakultas, dan program studi atas pelayanan akademik yang diberikan.
6. Seluruh keluarga besar, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, perhatian, dan dukungan tanpa henti sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini.
7. Sahabat-sahabat terbaik penulis, Beddu Azis, Abu, Tama, Ummi, Sri, Anno, dan Murni yang telah menjadi tempat berbagi cerita, memberikan semangat, serta menemani penulis dalam setiap proses perjalanan akademik hingga penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman HM-PS SPI, DEMA FUAD, serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, kerja sama, pengalaman, serta dukungan selama masa perkuliahan.
9. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Kadingeh, yang telah memberikan pengalaman, kebersamaan, serta pelajaran berharga selama pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
10. Teman-teman angkatan 2022 Program Studi Sejarah Peradaban Islam, yang telah menjadi rekan belajar, berdiskusi, dan saling berbagi pengalaman selama menjalani proses perkuliahan.

11. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Muh. Ardiansyah, yang telah berusaha, bertahan, dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap proses, tantangan, serta keterbatasan selama menempuh pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga setiap usaha yang telah dilakukan menjadi langkah awal menuju perjalanan yang lebih baik di masa mendatang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Sejarah Peradaban Islam, serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Parepare, 15 Juli 2026 M

29 Muharram 1448 H

Penulis,

Muh. Ardiansyah

NIM. 2220203880230001

ABSTRAK

Muh. Ardiansyah. Dinamika Politik Kedatuan Suppa Pasca Islamisasi Abad XVII (dibimbing oleh Dr. Ahmad Yani, M.Hum.).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Dinamika Politik Kedatuan Suppa Pasca Islamisasi Abad XVII yang di fokuskan pada: proses islamisasi di Kedatuan Suppa pada abad XVII, mengkaji bentuk dan dinamika politik yang terjadi setelah islamisasi, serta dampak politik yang ditimbulkan terhadap sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* dengan pendekatan historis, politik, dan sosial. Metode penelitian yang digunakan meliputi heuristik, kritik sumber (verifikasi), interpretasi, dan historiografi. Analisis penelitian didukung oleh Teori Islamisasi, Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons, serta Teori Akulturasi untuk menjelaskan proses perubahan politik, penyesuaian struktur pemerintahan, dan integrasi nilai-nilai Islam dengan sistem adat Bugis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses islamisasi di Kedatuan Suppa berlangsung melalui jalur perdagangan, dakwah, hubungan diplomatik, serta pengaruh Kerajaan Gowa-Tallo yang telah lebih dahulu menerima Islam. Penerimaan Islam oleh elite kerajaan, khususnya pada masa pemerintahan We Passulle Daeng Bulaeng, menjadi titik awal transformasi politik di Kedatuan Suppa. Islam tidak menghapus sistem adat yang telah berkembang, tetapi berintegrasi dengan nilai-nilai lokal melalui proses akulturasi. Transformasi tersebut ditandai dengan perubahan sumber legitimasi kekuasaan dari yang semula bertumpu pada adat dan konsep *To Manurung* menjadi legitimasi yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam, terbentuknya lembaga *Parewa Syara'* yang dipimpin oleh *Qadhi*, serta semakin besarnya peran ulama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dampak dari transformasi tersebut terlihat pada perubahan struktur pemerintahan, penguatan hubungan antara adat dan syariat, meningkatnya stabilitas politik kerajaan, serta berkembangnya identitas politik dan keagamaan Kedatuan Suppa sebagai bagian dari dinamika sejarah Islam di Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: Dinamika Politik, Kedatuan Suppa, Pasca Islamisasi, Transformasi Politik, Ajatappareng, Abad XVII.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

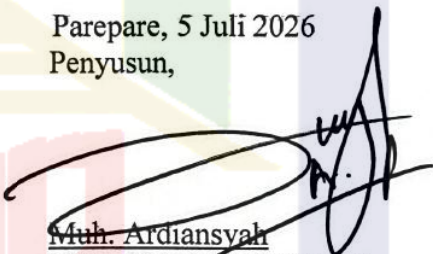
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muh. Ardiansyah
NIM : 2220203880230001
Tempat/Tanggal Lahir : Marabombang, 8 Agustus 2003
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Dinamika Politik Kedatuan Suppa Pasca Islamisasi

Abad XVII

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 5 Juli 2026
Penyusun,


Muh. Ardiansyah
NIM. 2220203880230001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Definifi Istilah/ Pengertian Judul	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	13
G. Landasan Teori.....	26
H. Kerangka Pikir	30
I. Metode Penelitian.....	31
BAB II PROSES ISLAMISASI DI KEDATUAN SUPPA ABAD XVII	40

	A. Kondisi Kedatuan Suppa Sebelum Islamisasi.....	40
	B. Jalur dan Faktor Islamisasi Kedatuan Suppa.....	44
	C. Proses Penerimaan Islam oleh Kedatuan Suppa	47
	D. Integrasi Islam dalam Kehidupan Politik dan Sosial	50
BAB III	DINAMIKA POLITIK KEDATUAN SUPPA PASCA ISLAMISASI	54
	A. Perubahan Legitimasi Kekuasaan Kedatuan Suppa	54
	B. Transformasi Struktur Pemerintahan	57
	C. Relasi Politik Politik Kedatuan Suppa dengan Kerajaan Lain.....	62
	D. Dinamika Politik dalam Perspektif Teori.....	65
BAB IV	DAMPAK POLITIK KEDATUAN SUPPA PASCA ISLAMISASI	71
	A. Dampak dalam Sistem Pemerintahan.....	71
	B. Dampak terhadap Legitimasi dan Kekuasaan Raja.....	74
	C. Dampak terhadap Kehidupan Sosial Politik Masyarakat.....	77
	D. Implikasi Transformasi Politik Kedatuan Suppa dalam Sejarah Sulawesi Selatan	81
BAB V	PENUTUP.....	84
	A. Simpulan	84
	B. Saran.....	84
	DAFTAR PUSTAKA	86
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
	BIOGRAFI PENULIS	V

DAFTAR TABEL

No Tabel	Daftar Tabel	Halaman
1	Persamaan Dan Perbedaan Peneliatan	21



DAFTAR LAMPIRAN

NO TABEL	JUDUL LAMPIRAN	HALAMAN
1	SK Pembimbing	Terlampir
2	Dokumentasi	Terlampir
3	Hasil Turnitin	Terlampir



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (”).

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A

ا	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَئِ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَّؤ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

- c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / نَئِ	Fathah dan Alif atau ya	A	a dan garis di atas
يَئِ	Kasrah dan Ya	I	i dan garis di atas
وَّؤ	Kasrah dan Wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يموت : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 الْحَجُّ : *al-hajj*
 نُعَمُّ : *nu‘ima*
 عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
 عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْغُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḥ lā bi khusus al-sabab

i. *Laḥ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laḥ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum proses islamisasi berlangsung, Kedatuan Suppa telah berkembang sebagai salah satu pusat kekuasaan penting di wilayah pesisir barat Sulawesi Selatan. Letak geografisnya yang strategis menjadikan Suppa sebagai jalur penghubung perdagangan antara kawasan pedalaman Sulawesi Selatan dengan berbagai pusat perdagangan maritim di Nusantara. Aktivitas perdagangan yang intensif tersebut tidak hanya mendorong perkembangan ekonomi kerajaan, tetapi juga memperluas jaringan politik dan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan lain di kawasan Ajatappareng maupun di luar Sulawesi Selatan. Dalam struktur pemerintahannya, Kedatuan Suppa dipimpin oleh seorang datu yang memperoleh legitimasi kekuasaan berdasarkan sistem adat, garis keturunan bangsawan, serta pengakuan masyarakat terhadap otoritas tradisional yang berlaku.¹

Sebagai anggota Konfederasi Ajatappareng, Kedatuan Suppa memiliki hubungan politik yang erat dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Sidenreng, Rappang, Sawitto, dan Alitta. Konfederasi ini dibentuk atas dasar kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas politik, keamanan wilayah, dan penguatan jaringan ekonomi antarkerajaan. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa sistem politik di kawasan Ajatappareng tidak bersifat sentralistik, melainkan dibangun melalui pola kerja sama yang memungkinkan setiap kerajaan tetap mempertahankan kedaulatannya masing-masing. Dalam konteks ini, Kedatuan Suppa memainkan peran penting sebagai kerajaan maritim yang menopang aktivitas perdagangan dan hubungan eksternal konfederasi.²

¹ Abdul Azis, Nurul Ummisa, dan Muh Ardiansyah, "Integrasi Islam Dalam Struktur Pemerintahan Dan Kehidupan Sosial Kedatuan Suppa Di Ajatappareng Abad 17 Masehi," *Batuthah: Jurnal Sejarah Padaban Islam* 4, no. 2 (2025): h. 219-233.

² Muhammad Amir, "Persekutuan lima Ajatappareng di Sulawesi Selatan abad ke-16," *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 1, no. 2 (2015): h. 317157.

Meskipun sistem politik tradisional yang berkembang di Kedatuan Suppa telah mampu menjaga stabilitas kerajaan dalam kurun waktu yang cukup panjang, perubahan-perubahan sosial yang terjadi akibat meningkatnya interaksi perdagangan dan kontak dengan dunia luar menciptakan ruang bagi masuknya pengaruh baru, termasuk agama Islam. Kehadiran para pedagang Muslim dari berbagai wilayah Nusantara dan mancanegara secara bertahap memperkenalkan nilai-nilai keislaman kepada masyarakat setempat. Proses ini kemudian mencapai titik penting ketika Islam diterima oleh kalangan elite kerajaan. Penerimaan tersebut tidak hanya menandai perubahan orientasi keagamaan penguasa, tetapi juga membuka peluang terjadinya transformasi dalam sistem politik, mekanisme legitimasi kekuasaan, dan tata pemerintahan Kedatuan Suppa pada abad XVII.

Islamisasi yang berlangsung di Sulawesi Selatan pada awal abad XVII tidak dapat dilepaskan dari ekspansi pengaruh politik Kerajaan Gowa-Tallo yang telah lebih dahulu menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan. Setelah Raja Gowa, Sultan Alauddin, memeluk Islam pada tahun 1605, proses penyebaran Islam ke berbagai kerajaan Bugis dilakukan melalui pendekatan diplomasi, dakwah, dan dalam beberapa kasus melalui tekanan politik serta militer yang dikenal sebagai *musu selleng* atau perang Islam.³ Kondisi tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, termasuk wilayah Ajatappareng yang pada akhirnya menerima Islam sebagai bagian dari sistem sosial dan politik kerajaan.

Penerimaan Islam oleh elite Kedatuan Suppa membawa konsekuensi terhadap sumber legitimasi kekuasaan yang sebelumnya bertumpu pada adat dan tradisi lokal. Sebelum islamisasi, kekuasaan seorang datu memperoleh pengakuan berdasarkan garis keturunan bangsawan, konsep *tomanurung*, serta norma adat yang berlaku dalam masyarakat Bugis.⁴ Namun setelah Islam diterima, legitimasi tersebut mengalami

³ Rofia Masrifah, "PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM MASA AWAL DI PULAU SULAWESI," *JB: Jurnal Bahasa Indonesia* 2, no. 1 (2024): h. 1-10.

⁴ Azis, Ummisa, dan Ardiansyah, "Integrasi Islam Dalam Struktur Pemerintahan Dan Kehidupan Sosial Kedatuan Suppa Di Ajatappareng Abad 17 Masehi," h. 219–233.

perluasan dengan masuknya unsur-unsur keagamaan yang memberikan dasar moral dan spiritual bagi kekuasaan penguasa. Dalam perkembangan selanjutnya, seorang penguasa tidak hanya dituntut memiliki legitimasi genealogis, tetapi juga harus menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai Islam sebagai agama yang dianut masyarakat kerajaan.

Transformasi tersebut juga terlihat dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. Kehadiran Islam mendorong munculnya institusi-institusi keagamaan yang mulai berperan dalam kehidupan politik kerajaan. Jabatan-jabatan yang berkaitan dengan urusan keagamaan, seperti kadhi atau penasihat agama, mulai memperoleh posisi penting dalam struktur pemerintahan.⁵ Selain berfungsi sebagai pembimbing keagamaan masyarakat, mereka juga terlibat dalam penyelesaian sengketa, pelaksanaan hukum Islam, serta pemberian pertimbangan kepada penguasa dalam pengambilan keputusan politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa islamisasi tidak hanya menghasilkan perubahan simbolik, tetapi juga menciptakan penyesuaian kelembagaan dalam sistem pemerintahan kerajaan.

Transformasi politik dalam masyarakat tradisional merupakan salah satu tema penting dalam kajian ilmu sosial dan sejarah, khususnya dalam memahami dinamika perubahan kekuasaan, struktur sosial, dan sistem nilai dalam suatu komunitas. Dalam perspektif konseptual, transformasi politik tidak hanya dipahami sebagai perubahan institusional semata, tetapi juga sebagai proses kompleks yang melibatkan interaksi antara faktor internal dan eksternal, termasuk agama, ekonomi, dan budaya.⁶ Oleh karena itu, kajian mengenai transformasi politik sering kali beririsan dengan pendekatan historis, antropologis, dan sosiologis yang saling melengkapi.

Dalam perkembangan literatur ilmiah, agama sering ditempatkan sebagai salah satu faktor kunci dalam mendorong perubahan politik di berbagai wilayah dunia.

⁵ Leonard Y Andaya, *The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi in the Seventeenth Century* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1981), h. 45–48.

⁶ A Hannan dan K Abdillah, “Hegemoni religio-kekuasaan dan transformasi sosial mobilisasi jaringan kekuasaan dan keagamaan kyai dalam dinamika sosio-kultural masyarakat,” *Sosial Budaya* 16, no. 1 (2019): 9–24.

Proses islamisasi, misalnya, tidak hanya dipahami sebagai fenomena keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan yang mampu mengubah sistem legitimasi kekuasaan dan struktur pemerintahan.⁷ Sejumlah karya ilmiah menunjukkan bahwa masuknya Islam ke dalam masyarakat lokal sering diikuti oleh proses adaptasi dan negosiasi antara nilai-nilai lama dengan ajaran baru yang dibawa oleh agama tersebut.

Dalam konteks Nusantara, kajian mengenai islamisasi telah berkembang pesat dalam berbagai disiplin ilmu, terutama sejarah dan antropologi. Para peneliti menyoroti bagaimana Islam masuk melalui jalur perdagangan, dakwah, serta hubungan politik antar kerajaan. Literatur yang berkembang juga menunjukkan bahwa islamisasi tidak berlangsung secara seragam, melainkan melalui proses yang bertahap dan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.⁸

Lebih lanjut, dalam studi tentang kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan, islamisasi sering dikaitkan dengan perubahan dalam sistem pemerintahan dan struktur kekuasaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerimaan Islam oleh elite penguasa menjadi titik penting dalam proses transformasi politik seperti yang diungkapkan oleh Christian Pelras dalam pembahasannya tentang masyarakat Bugis-Makassar menjelaskan bahwa “Islamisasi kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan berlangsung efektif setelah para raja menerima Islam dan menjadikannya bagian dari legitimasi politik kerajaan.”, karena agama baru tersebut memberikan legitimasi baru terhadap kekuasaan yang ada. Dalam hal ini, islamisasi tidak hanya memperkuat posisi penguasa, tetapi juga mengubah relasi antara penguasa dan masyarakat.

Kedatuan Suppa sebagai salah satu entitas politik lokal di Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis dalam jaringan perdagangan dan kekuasaan pada masa lalu. Suppa disebut sebagai bagian dari konfederasi Ajatappareng yang memiliki peran

⁷ Y Nurcahya et al., “Jejak Islam dan Kekuasaan di Indonesia dalam Konteks Politik Asia Tenggara,” *Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 21, no. 2 (2025): 225–36.

⁸ M Mardia dan S Febriani, “Sejarah Awal Perkembangan Islam di Indonesia,” *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization* 14, no. 01 (2025): 1–34.

penting dalam dinamika politik regional.⁹ Oleh karena itu, kajian mengenai transformasi politik di Kedatuan Suppa menjadi relevan untuk memahami perubahan yang terjadi di kawasan tersebut, khususnya setelah masuknya Islam pada abad XVII.

Perdebatan dalam kajian literatur juga muncul terkait sejauh mana islamisasi benar-benar mengubah sistem politik lokal. Sebagian peneliti berpendapat bahwa islamisasi membawa perubahan signifikan dalam struktur kekuasaan dan legitimasi politik seperti yang di ungkapkan Anthony Reid

Reid menegaskan bahwa Islamisasi di Asia Tenggara berkaitan erat dengan pembentukan kekuasaan politik baru dan penguatan otoritas elite kerajaan,¹⁰ sementara Clifford Geertz melihat bahwa perubahan tersebut lebih bersifat simbolik dan tidak mengubah secara mendasar sistem yang telah ada sebelumnya¹¹. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya ruang untuk kajian lebih lanjut yang lebih mendalam dan kontekstual.

Sebagian besar kajian masih bersifat deskriptif dan belum banyak menggunakan kerangka teori yang dapat menjelaskan dinamika perubahan secara lebih sistematis seperti yang ada pada ungkapan Kuntowijoyo “Sejarah tidak cukup hanya bersifat deskriptif-naratif, tetapi harus sampai pada analisis mengenai struktur dan proses sosial”¹². Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang tidak hanya mengandalkan deskripsi historis, tetapi juga mengembangkan analisis konseptual yang lebih mendalam.

Kesenjangan (research gap) inilah yang menjadi dasar penting bagi dilakukannya penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (library research), penelitian ini berupaya mengkaji secara kritis berbagai sumber pustaka yang relevan untuk memahami transformasi politik Kedatuan Suppa pasca islamisasi abad

⁹K Khaeruddin, “Dinamika Politik Kerajaan–Kerajaan Lokal di Sulawesi Selatan,” *Yupa: Historical Studies Journal* 6, no. 2 (2022): 111–24.

¹⁰Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680, Volume Two: Expansion and Crisis* (New Haven: Yale University Press, 1993), hlm. 151

¹¹Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: University of Chicago Press, 1960), hlm. 5.

¹²Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 15.

XVII. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan berbagai perspektif yang ada dalam literatur serta mengidentifikasi pola-pola perubahan yang terjadi.

Penelitian ini juga berupaya untuk mengkaji ulang konsep transformasi politik dalam konteks lokal dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti legitimasi kekuasaan, struktur pemerintahan, serta relasi antara agama dan politik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian teoritis mengenai transformasi politik di masyarakat tradisional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses islamisasi pada abad XVII berlangsung di Kedatuan Suppa ?
2. Bagaimana bentuk dan dinamika politik di Kedatuan Suppa pasca islamisasi ?
3. Bagaimana dampak politik Kedatuan Suppa Pasca Islamisasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses islamisasi pada abad XVII di Kedatuan Suppa.
2. Untuk menganalisis bentuk dan dinamika transformasi politik di Kedatuan Suppa pasca islamisasi, khususnya dalam relasi antara agama dan kekuasaan dalam perspektif teoritis.
3. Untuk mengkaji dan mengetahui dampak politik Kedatuan Suppa Pasca Islamisasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sejarah, ilmu politik, dan kajian sosial-budaya. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memperkaya khazanah kajian mengenai transformasi politik di masyarakat tradisional, terutama yang berkaitan dengan pengaruh islamisasi terhadap sistem kekuasaan lokal.

- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi konseptual dalam memahami hubungan antara agama dan politik dalam konteks historis di Nusantara. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan perspektif baru dalam kajian transformasi politik berbasis lokal dengan pendekatan kepustakaan (library research), serta memperkuat landasan teoritis bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik pada kajian sejarah lokal, khususnya terkait Kedatuan Suppa dan proses islamisasi di Sulawesi Selatan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai dinamika sejarah dan perubahan politik di daerahnya, sehingga dapat memperkuat kesadaran akan identitas dan warisan budaya lokal
- b. Bagi pengembangan penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan dalam mengkaji fenomena serupa di wilayah lain, serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan konsep atau kebijakan yang berkaitan dengan pelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya.

E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam penelitian dan meminimalisir timbulnya kesalahpahaman atas judul penelitian, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari subjudul sebagai berikut:

1. Dinamika Politik

Dinamika politik secara terminologis berasal dari dua kata, yaitu *dinamika* yang berarti gerak, perubahan, atau perkembangan yang berlangsung secara terus-menerus, serta *politik* yang merujuk pada proses pengelolaan kekuasaan, pengambilan keputusan, dan pengaturan kehidupan masyarakat dalam suatu sistem pemerintahan¹³. Dengan demikian, dinamika politik dapat dipahami sebagai proses perubahan,

¹³Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 13–17

perkembangan, dan interaksi yang terjadi dalam struktur kekuasaan, institusi politik, maupun hubungan antara aktor-aktor politik dalam suatu masyarakat. Menurut Miriam Budiardjo, politik pada hakikatnya berkaitan dengan usaha untuk menentukan dan melaksanakan tujuan-tujuan bersama dalam suatu masyarakat melalui penggunaan kekuasaan dan kewenangan. Oleh karena itu, dinamika politik tidak hanya mencerminkan perubahan dalam lembaga pemerintahan, tetapi juga perubahan dalam pola hubungan kekuasaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Secara epistemologis, konsep dinamika politik berkembang dari berbagai tradisi pemikiran dalam ilmu politik dan ilmu sosial. Dalam perspektif klasik, pemikiran Aristoteles memandang politik sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang baik (*the good life*) melalui pengelolaan negara yang ideal. Namun dalam perkembangan ilmu politik modern, dinamika politik dipahami sebagai hasil interaksi antara berbagai kekuatan sosial, ekonomi, budaya, dan ideologi yang memengaruhi distribusi kekuasaan dalam masyarakat¹⁴. David Easton menjelaskan bahwa politik merupakan suatu sistem yang secara terus-menerus menerima tuntutan (*demands*) dan dukungan (*supports*) dari lingkungan sosial, kemudian mengolahnya menjadi kebijakan yang mengikat masyarakat. Pandangan ini menunjukkan bahwa perubahan politik merupakan proses yang dinamis dan tidak dapat dipisahkan dari perubahan sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat tersebut..

Dalam kajian sejarah dan sosiologi politik, dinamika politik sering dikaitkan dengan konsep perubahan sosial (*social change*) dan transformasi kekuasaan. Samuel P. Huntington menjelaskan bahwa perubahan politik terjadi ketika terdapat perubahan dalam struktur sosial, sistem nilai, atau institusi yang mengatur kehidupan masyarakat. Dinamika politik dapat muncul sebagai akibat dari perubahan ekonomi, perkembangan agama, konflik kekuasaan, maupun interaksi dengan budaya luar¹⁵.

¹⁴David Easton, *A Systems Analysis of Political Life* (New York: John Wiley & Sons, 1965), hlm. 21–32

¹⁵Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies* (New Haven: Yale University Press, 1968), hlm. 1–8.

Dengan demikian, suatu sistem politik tidak pernah berada dalam kondisi yang benar-benar statis karena selalu mengalami proses penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Perspektif ini memberikan pemahaman bahwa dinamika politik bukan sekadar pergantian pemimpin atau institusi, melainkan perubahan yang menyentuh struktur dan mekanisme kekuasaan secara lebih mendalam.

Dalam konteks masyarakat tradisional, dinamika politik memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat modern. Perubahan politik dalam masyarakat tradisional umumnya berlangsung secara bertahap dan sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor kultural serta keagamaan. Clifford Geertz menjelaskan bahwa dalam masyarakat tradisional, simbol-simbol budaya dan agama memiliki peran penting dalam membentuk legitimasi kekuasaan¹⁶. Oleh karena itu, masuknya agama baru ke dalam suatu masyarakat sering kali membawa konsekuensi terhadap perubahan pola kekuasaan, sistem legitimasi, dan hubungan antara penguasa dengan rakyat. Dalam kondisi seperti ini, agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai instrumen politik yang dapat memperkuat atau mengubah struktur kekuasaan yang telah ada sebelumnya.

Konsep dinamika politik menjadi sangat relevan dalam mengkaji sejarah Kedatuan Suppa pasca islamisasi abad XVII. Sebagai salah satu kerajaan penting dalam Konfederasi Ajatappareng, Kedatuan Suppa mengalami berbagai perubahan setelah penerimaan Islam oleh elite kerajaan¹⁷. Sebelum islamisasi, legitimasi kekuasaan datu terutama bersumber dari adat, keturunan bangsawan, dan konsep *tomanurung* yang telah mengakar dalam tradisi politik Bugis. Namun setelah Islam diterima sebagai agama kerajaan, muncul sumber legitimasi baru yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Perubahan tersebut menunjukkan adanya dinamika politik yang tidak hanya menyentuh aspek keagamaan, tetapi juga memengaruhi struktur

¹⁶Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), hlm. 110–125.

¹⁷Christian Pelras, *Manusia Bugis* (Jakarta: Nalar dan Forum Jakarta-Paris, 2006), hlm. 191–202.

pemerintahan, pola hubungan kekuasaan, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam kerajaan.

Melalui perspektif dinamika politik, proses islamisasi di Kedatuan Suppa dapat dipahami sebagai bagian dari transformasi politik yang melibatkan interaksi antara tradisi lokal dan nilai-nilai baru yang dibawa oleh Islam¹⁸. Perubahan tersebut tidak berlangsung dalam bentuk penghapusan total terhadap sistem lama, melainkan melalui proses adaptasi dan integrasi yang menghasilkan bentuk politik baru yang khas. Oleh karena itu, penelitian mengenai “Dinamika Politik Kedatuan Suppa Pasca Islamisasi Abad XVII” menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana perubahan legitimasi kekuasaan, struktur pemerintahan, serta relasi politik dalam masyarakat Bugis berlangsung setelah penerimaan Islam. Kajian ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai sejarah politik lokal Sulawesi Selatan, tetapi juga memperkaya diskursus akademik tentang hubungan antara agama dan perubahan politik dalam masyarakat tradisional Nusantara.

2. Kedatuan Suppa

Kedatuan Suppa merupakan salah satu entitas politik tradisional yang memiliki peran penting dalam dinamika sejarah di kawasan Ajatappareng, Sulawesi Selatan. Sebagai sebuah kedatuan, Suppa tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Letaknya yang strategis di wilayah pesisir menjadikan Kedatuan Suppa berkembang sebagai salah satu simpul penting dalam jaringan perdagangan maritim, baik dalam skala lokal maupun antar wilayah di Nusantara.

Dalam struktur politiknya, Kedatuan Suppa dipimpin oleh seorang datu yang memiliki otoritas dalam mengatur jalannya pemerintahan serta menjaga stabilitas sosial masyarakat. Namun demikian, kekuasaan datu tidak berjalan secara absolut, melainkan didukung oleh struktur adat dan perangkat pemerintahan tradisional

¹⁸Leonard Y. Andaya, *The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi in the Seventeenth Century* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1981), hlm. 42–49.

lainnya. Para pemangku adat, bangsawan, serta tokoh masyarakat memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mencerminkan adanya sistem politik yang bersifat kolektif dan berbasis pada nilai-nilai musyawarah.

Sebagai bagian dari konfederasi Ajatappareng, Kedatuan Suppa memiliki hubungan yang erat dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Sidenreng, Rappang, dan Sawitto. Hubungan ini terjalin dalam bentuk aliansi politik, kerja sama ekonomi, serta interaksi sosial budaya yang saling memengaruhi. Dalam konteks ini, Kedatuan Suppa tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem regional yang memiliki dinamika kekuasaan yang kompleks. Posisi ini turut memperkuat peran Suppa dalam percaturan politik di Sulawesi Selatan pada masa lalu.

Dari sisi ekonomi, Kedatuan Suppa dikenal sebagai wilayah yang memiliki aktivitas perdagangan yang cukup maju. Keberadaan pelabuhan dan akses terhadap jalur pelayaran menjadikan wilayah ini sebagai tempat bertemunya berbagai kelompok pedagang, baik dari dalam maupun luar daerah. Interaksi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa pengaruh budaya dan agama, termasuk masuknya Islam yang kemudian menjadi faktor penting dalam perubahan sosial dan politik di Kedatuan Suppa.

Masuknya Islam ke Kedatuan Suppa pada abad XVII menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perkembangan wilayah ini.¹⁹ Islam tidak hanya diterima sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga mulai memengaruhi sistem nilai dan praktik politik yang berlaku. Penguasa lokal mengadopsi ajaran Islam sebagai bagian dari legitimasi kekuasaan, yang kemudian berdampak pada perubahan dalam struktur pemerintahan serta hubungan antara penguasa dan masyarakat. Proses ini menunjukkan adanya transformasi yang tidak hanya bersifat religius, tetapi juga politis.

Dalam perkembangan selanjutnya, Kedatuan Suppa mengalami berbagai dinamika, baik akibat interaksi internal maupun pengaruh eksternal. Perubahan-

¹⁹Azis, Ummisa, dan Ardiansyah, “Integrasi Islam Dalam Struktur Pemerintahan Dan Kehidupan Sosial Kedatuan Suppa Di Ajatappareng Abad 17 Masehi.”

perubahan tersebut mencerminkan kemampuan kedatuan dalam beradaptasi dengan kondisi yang terus berkembang. Meskipun mengalami transformasi, Kedatuan Suppa tetap mempertahankan identitasnya sebagai lembaga tradisional yang berakar pada nilai-nilai lokal, sekaligus menjadi bagian penting dalam sejarah dan perkembangan politik di Sulawesi Selatan.

3. Pasca Islamisasi Abad XVII

Pasca Islamisasi abad XVII merupakan periode setelah diterimanya Islam sebagai agama resmi oleh kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, termasuk wilayah Kedatuan Suppa dalam konfederasi Ajatappareng. Periode ini ditandai dengan terjadinya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama pada sistem politik, legitimasi kekuasaan, struktur sosial, serta hubungan antara adat dan agama. Islamisasi tidak hanya dipahami sebagai proses perpindahan keyakinan keagamaan, tetapi juga sebagai proses transformasi sosial-politik yang memengaruhi tata pemerintahan kerajaan.

Pada abad XVII, Islam berkembang pesat di Sulawesi Selatan setelah kerajaan Gowa-Tallo menerima Islam pada awal abad tersebut dan kemudian menyebarkannya ke berbagai kerajaan Bugis melalui jalur politik, diplomasi, perdagangan, maupun ekspansi kekuasaan. Dalam konteks Kedatuan Suppa, penerimaan Islam oleh elite penguasa menjadi titik penting yang mengubah dasar legitimasi politik kerajaan. Sebelum Islamisasi, legitimasi kekuasaan penguasa lebih bertumpu pada tradisi adat, garis keturunan bangsawan, dan konsep kepercayaan lokal. Namun setelah Islam diterima, penguasa mulai memperoleh legitimasi baru sebagai pemimpin yang tidak hanya menjaga adat, tetapi juga menjalankan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan.

Pasca Islamisasi abad XVII juga memperlihatkan adanya proses adaptasi antara sistem adat Bugis dengan ajaran Islam. Nilai-nilai Islam mulai diintegrasikan ke dalam struktur pemerintahan, hukum adat, dan kehidupan sosial masyarakat tanpa sepenuhnya menghilangkan tradisi lokal yang telah berkembang sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Islamisasi di Kedatuan Suppa berlangsung melalui proses akulturasi dan penyesuaian budaya. Christian Pelras menjelaskan bahwa

masyarakat Bugis-Makassar tetap mempertahankan unsur adat dalam sistem sosial-politiknya meskipun Islam telah menjadi bagian penting dalam legitimasi kerajaan.

Dalam perspektif transformasi politik, pasca Islamisasi abad XVII dapat dipahami sebagai fase perubahan struktur kekuasaan dan orientasi politik kerajaan. Islam memberikan dasar legitimasi baru bagi penguasa sekaligus memperkuat hubungan politik kerajaan dengan jaringan Islam yang lebih luas di Nusantara. Anthony Reid menegaskan bahwa Islamisasi di Asia Tenggara berkaitan erat dengan penguatan otoritas politik penguasa dan pembentukan jaringan kekuasaan baru yang terhubung dengan dunia Islam. Oleh karena itu, penelitian mengenai *Transformasi Politik Kedatuan Suppa Pasca Islamisasi Abad XVII* tidak hanya mengkaji perubahan agama semata, tetapi juga menganalisis bagaimana Islam memengaruhi sistem pemerintahan, legitimasi politik, serta dinamika hubungan adat dan kekuasaan dalam kerajaan Suppa.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka merupakan suatu usaha untuk menunjukkan sumber-sumber yang terkait dengan judul penelitian. Serta menelusuri tulisan atau penelitian yang relevan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis. Hal ini juga bertujuan untuk menemukan data sebagai bahan perbandingan atau referensi agar data yang dikaji itu lebih jelas.

Penelitian ini mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Pengkajian ini dilakukan dengan tujuan agar terhindar dari penelitian yang sama. Jikapun ada penelitian terdahulu yang sama maka penulis berusaha mempelajari serta memahami untuk mengetahui titik perbedaan agar terhindar dari pelagiat penelitian terdahulu. Pada bagian ini peneliti menyajikan beberapa hasil penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Tulisan yang disusun oleh Ahmad Yani berjudul “*Islamisasi di Ajatappareng Abad XVI–XVII*”,²⁰ merupakan kajian historis yang membahas proses masuk dan berkembangnya Islam di wilayah Ajatappareng, yaitu konfederasi lima kerajaan Bugis yang terdiri atas Sidenreng, Sawitto, Suppa, Rappang, dan Alitta. Penelitian ini menjelaskan bahwa islamisasi telah mulai berlangsung sejak abad XVI, namun penerimaan Islam oleh para penguasa terjadi pada awal abad XVII, khususnya setelah kedatangan tiga muballigh dari Minangkabau, salah satunya Datuk ri Bandang. Proses ini juga tidak terlepas dari peran Sultan Alauddin dari Gowa yang merekomendasikan dakwah di wilayah Ajatappareng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa islamisasi berlangsung secara damai dan melalui jalur hubungan kekerabatan (*passeajingeng*) antara Ajatappareng dan Gowa.

Kesamaan antara penelitian Ahmad Yani dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai islamisasi di wilayah Ajatappareng, termasuk Kedatuan Suppa sebagai bagian dari konfederasi tersebut. Keduanya sama-sama menekankan bahwa proses islamisasi memiliki peran penting dalam mengubah tatanan kehidupan masyarakat, baik dalam aspek sosial maupun politik. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus analisis, di mana penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada proses masuknya Islam dan aktor-aktor yang berperan dalam penyebarannya, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada dampak islamisasi terhadap transformasi politik, khususnya perubahan legitimasi kekuasaan dan struktur pemerintahan di Kedatuan Suppa.

Meskipun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang sangat penting sebagai landasan awal dalam memahami proses islamisasi di Ajatappareng. Informasi mengenai waktu, aktor, serta pola penyebaran Islam menjadi dasar bagi penulis untuk menganalisis perubahan politik yang terjadi setelahnya. Dengan demikian, penelitian ini digunakan sebagai pijakan untuk menelusuri bagaimana

²⁰Ahmad Yani, “Islamisasi di Ajatappareng Abad XVI–XVII,” *PUSAKA* 8, no. 2 (2020): 191–210, <https://doi.org/10.31969/pusaka.v8i2.420>.

islamisasi tidak hanya berhenti pada aspek religius, tetapi juga berlanjut pada transformasi sistem kekuasaan di Kedatuan Suppa pada abad XVII.

2. Tulisan yang disusun oleh Muhammad Amir berjudul “*Konflik dan Relasi Kekuasaan di Ajatappareng 1905–1942 (Conflict and Power Relations on Ajatappareng 1905–1942)*”,²¹ merupakan kajian penting yang membahas dinamika konflik politik antara pemerintah Hindia Belanda dan penguasa lokal di wilayah Ajatappareng. Penelitian ini menyoroti bagaimana kepentingan politik dan ekonomi kolonial mendorong upaya dominasi langsung terhadap kerajaan-kerajaan seperti Suppa, Sidenreng, Sawitto, Rappang, dan Alitta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik tersebut berakhir dengan penandatanganan *korte verklaring*, yang menandai melemahnya kedaulatan penguasa lokal dan beralihnya otoritas kekuasaan ke tangan pemerintah kolonial. Dengan menggunakan metode sejarah, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai perubahan relasi kekuasaan pada masa kolonial.

Kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai dinamika kekuasaan di wilayah Ajatappareng, termasuk Kedatuan Suppa sebagai bagian penting di dalamnya. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam ruang lingkup waktu dan fokus analisis. Penelitian Muhammad Amir berfokus pada abad XX dengan penekanan pada konflik kolonial, sedangkan penelitian ini mengkaji abad XVII dengan fokus pada transformasi politik pasca islamisasi. Jika penelitian tersebut menitikberatkan pada tekanan eksternal dari kolonialisme, maka penelitian ini lebih menyoroti perubahan internal dalam sistem politik, khususnya pergeseran legitimasi kekuasaan akibat masuknya Islam.

Meskipun demikian, penelitian ini tetap memberikan kontribusi penting bagi penelitian penulis, terutama dalam memahami kesinambungan sejarah politik di Ajatappareng. Kajian mengenai perubahan relasi kekuasaan pada masa kolonial membantu penulis dalam melihat perkembangan lebih lanjut dari sistem politik yang sebelumnya telah mengalami transformasi akibat islamisasi. Dengan demikian,

²¹Muhammad Amir et al., “Conflict and Power Relations on Ajatappareng 1905-1942,” *Seminar Series in Humanities and Social Sciences* 1, no. 1 (2019): 68–86.

penelitian ini menjadi sumber pendukung yang memperkaya analisis mengenai dinamika kekuasaan di Kedatuan Suppa dalam konteks sejarah yang lebih luas.

3. Tulisan yang disusun oleh Ahmad Yani, Ahmad Zulfikar, Susi Mako, dan Mirnanini Mirnanini berjudul “*Penerimaan dan Perkembangan Islam di Kerajaan Suppa Abad ke-17*”,²² merupakan kajian sejarah yang membahas proses masuknya Islam serta dampaknya terhadap perubahan sosial dan budaya di Kerajaan Suppa. Penelitian ini menggunakan metode sejarah melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan Islam di Suppa dipengaruhi oleh interaksi perdagangan, migrasi, dan dakwah ulama, khususnya peran Datuk Ribandang yang mengislamkan Raja Suppa, We Passulle Daeng Bulaeng. Selain itu, islamisasi juga didorong oleh faktor pelayaran, kedatangan pedagang Arab, serta migrasi Melayu pasca jatuhnya Malaka. Setelah penguasa menerima Islam, terjadi perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan dengan dibentuknya lembaga Parewa Syara’ yang dipimpin oleh Qadhi sebagai bentuk integrasi syariat Islam ke dalam struktur politik dan sosial.

Kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai islamisasi di Kedatuan Suppa serta dampaknya terhadap perubahan sosial dan politik. Keduanya sama-sama menyoroti peran penting elite penguasa dalam proses penerimaan Islam serta bagaimana nilai-nilai Islam mulai diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus analisis, di mana penelitian ini lebih menekankan pada aspek transformasi politik secara menyeluruh, khususnya perubahan legitimasi kekuasaan dan struktur politik pasca islamisasi. Sementara itu, penelitian tersebut lebih berfokus pada proses penerimaan Islam dan perubahan sosial budaya yang mengikutinya.

Meskipun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang sangat penting bagi penelitian penulis, terutama dalam menjelaskan fase awal islamisasi di Kedatuan Suppa dan dampaknya terhadap pembentukan lembaga-lembaga baru

²²A Yani dan A Zulfikar, “Penerimaan dan Perkembangan Islam di Kerajaan Suppa,” *PUSAKA* 12, no. 2 (2024): 427–40.

dalam pemerintahan. Data mengenai peran tokoh, faktor penyebab islamisasi, serta integrasi syariat Islam menjadi dasar yang kuat untuk menganalisis transformasi politik yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini digunakan sebagai rujukan utama dalam memahami bagaimana islamisasi menjadi titik awal perubahan struktur kekuasaan di Kedatuan Suppa pada abad XVII.

4. Tulisan yang disusun oleh Khaeruddin berjudul “*Dinamika Politik Kerajaan–Kerajaan Lokal di Sulawesi Selatan: Dari Persekutuan Diplomasi Hingga Konfrontasi Perebutan Superioritas (Abad XV–XVII)*”,²³ merupakan kajian yang membahas perkembangan politik kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan dalam rentang waktu abad XV hingga XVII. Penelitian ini menggunakan metode sejarah melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi dengan pendekatan *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan lokal seperti Luwu, Gowa, Bone, Soppeng, dan Wajo memiliki dinamika politik yang kompleks, mulai dari pembentukan persekutuan hingga konflik perebutan kekuasaan. Selain itu, dijelaskan bahwa kekuasaan politik di wilayah ini berkembang dari mitos asal-usul To Manurung hingga terbentuknya hegemoni politik, seperti dominasi Kerajaan Bone pasca Perang Makassar.

Kesamaan antara penelitian Khaeruddin dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai dinamika politik di Sulawesi Selatan pada periode yang relatif sama, yaitu abad XV–XVII. Keduanya sama-sama membahas perubahan struktur kekuasaan serta interaksi antar kerajaan dalam membentuk sistem politik regional. Namun, terdapat perbedaan yang cukup jelas, di mana penelitian tersebut bersifat makro dengan cakupan seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan, sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada Kedatuan Suppa sebagai objek kajian spesifik. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada transformasi politik pasca islamisasi, sementara penelitian tersebut lebih menyoroti dinamika politik berupa persekutuan dan konflik kekuasaan.

²³Khaeruddin, “Dinamika Politik Kerajaan–Kerajaan Lokal di Sulawesi Selatan.”

Meskipun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi penelitian penulis dalam memahami konteks politik yang lebih luas di Sulawesi Selatan. Kajian mengenai hubungan antar kerajaan, konflik, dan hegemoni kekuasaan membantu penulis dalam menempatkan Kedatuan Suppa dalam jaringan politik regional. Dengan demikian, penelitian ini digunakan sebagai sumber pendukung untuk memperkuat analisis mengenai bagaimana transformasi politik di Kedatuan Suppa tidak terlepas dari dinamika kekuasaan yang lebih luas pada abad XV hingga XVII.

5. Tulisan yang disusun oleh Muh. Ilham Majid, Abd. Rahim Yunus, dan Wahyuddin berjudul *“Perkembangan Islam di Kedatuan Suppa Abad ke-17”*²⁴ merupakan kajian yang membahas proses masuk, penerimaan, serta perkembangan Islam di Kedatuan Suppa. Penelitian ini menggunakan metode sejarah melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, dengan pendekatan antropologi budaya dan sosiologi sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masuknya Islam di Suppa tidak terlepas dari jalur pelayaran dan perdagangan di wilayah pesisir, kemudian diterima secara melembaga pada masa pemerintahan Datu Suppa We Passulle Daeng Bulaeng sekitar tahun 1609. Setelah itu, Islam berkembang dan terintegrasi dalam kehidupan masyarakat hingga menjadi bagian dari identitas sosial budaya masyarakat Suppa.

Kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai islamisasi di Kedatuan Suppa pada abad XVII serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Keduanya sama-sama menekankan peran penting penguasa dalam proses penerimaan Islam dan integrasinya ke dalam sistem sosial. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus analisis, di mana penelitian Muh. Ilham Majid dan tim lebih menitikberatkan pada perkembangan Islam dalam aspek sosial dan budaya, sedangkan penelitian ini berfokus pada transformasi politik, khususnya perubahan struktur kekuasaan dan legitimasi pemerintahan pasca islamisasi.

²⁴M I Majid dan A R Yunus, “Perkembangan Islam di Kedatuan Suppa Abad ke-17,” *CARITA* 2, no. 1 (2023): 1–17.

Meskipun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting sebagai dasar dalam memahami proses awal dan perkembangan Islam di Kedatuan Suppa. Informasi mengenai waktu penerimaan Islam, peran elite penguasa, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam masyarakat menjadi landasan bagi penulis untuk menganalisis perubahan politik yang terjadi. Dengan demikian, penelitian ini digunakan sebagai rujukan untuk memperkuat analisis bahwa islamisasi tidak hanya berdampak pada aspek sosial budaya, tetapi juga memicu transformasi politik di Kedatuan Suppa pada abad XVII.

Agar dapat memudahkan untuk memahami perbedaan dan persamaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini, maka akan diuraikan dalam tabel berikut:

No	Nama Peneliti	Judul	Perbedaan	Kesamaan
1.	Ahmad Yani (2020)	Islamisasi di Ajatappareng Abad XVI–XVII	Penelitian tersebut berfokus pada proses masuknya Islam di seluruh Ajatappareng, sedangkan penelitian ini lebih spesifik mengkaji dampak islamisasi terhadap transformasi politik di Kedatuan Suppa. Selain itu,	Sama-sama mengkaji islamisasi di wilayah Ajatappareng pada abad XVI–XVII serta menyoroti peran tokoh seperti Datuk ri Bandang dan penerimaan Islam oleh elite penguasa. Keduanya juga menggunakan pendekatan historis dan melihat islamisasi sebagai proses yang

			penelitian ini lebih menekankan perubahan struktur kekuasaan dan legitimasi politik, sehingga bersifat lebih analitis dibandingkan penelitian sebelumnya.	berlangsung secara damai.
2. 2.	Muhammad Amir (2019)	Konflik Dan Relasi Kekuasaan Di Ajatappareng 1905-1942 (Conflict And Power Relations On Ajatappareng 1905-1942)	Penelitian Muhammad Amir berfokus pada konflik dan relasi kekuasaan pada masa kolonial (1905–1942), dengan penekanan pada intervensi pemerintah Hindia Belanda dan dampaknya terhadap melemahnya kekuasaan lokal.	Sama-sama membahas mengenai pengaruh islamisasi terhadap perubahan sosial dan politik.

			Sementara itu, penelitian ini mengkaji periode yang lebih awal, yaitu abad XVII, dengan fokus pada transformasi politik Kedatuan Suppa pasca islamisasi. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan perubahan internal sistem kekuasaan akibat pengaruh Islam, bukan tekanan eksternal kolonial, sehingga bersifat lebih analitis terhadap perubahan struktur dan legitimasi politik lokal.	
3.	Ahmad Yani,Ahmad	Penerimaan	Penelitian	Sama-sama

	Zulfikar,Susi Mako,Mirnanini Mirnanini (2024)	dan Perkembangan Islam di Kerajaan Suppa Abad ke-17	tersebut lebih menitikberatkan pada proses penerimaan Islam serta dampaknya terhadap aspek sosial dan budaya masyarakat, termasuk pembentukan lembaga Parewa Syara'. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada transformasi politik secara menyeluruh, khususnya perubahan struktur kekuasaan, legitimasi politik, dan sistem pemerintahan pasca islamisasi. Dengan demikian,	mengkaji islamisasi di Kedatuan Suppa pada abad XVII serta menyoroti peran penting penguasa dan tokoh seperti Datuk Ribandang dalam proses tersebut. Keduanya juga menggunakan pendekatan historis dan menunjukkan bahwa islamisasi membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk pada aspek pemerintahan.
--	--	--	--	--

			penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya dengan memberikan analisis yang lebih mendalam pada aspek politik yang belum banyak dikaji.	
4.	Khaeruddin (1991)	Dinamika Politik Kerajaan Kerajaan Lokal di Sulawesi Selatan : Dari Persekutuan Diplomasi Hingga Konfrontasi Perebutan Superioritas (Abad XV-XVII)	Penelitian Khaeruddin bersifat luas (makro) karena membahas berbagai kerajaan di Sulawesi Selatan secara umum serta menekankan pada persekutuan, diplomasi, dan konflik perebutan kekuasaan. Sementara itu,	sama-sama mengkaji dinamika politik di Sulawesi Selatan pada abad XV–XVII dengan menggunakan pendekatan historis. Keduanya juga membahas perubahan struktur

			penelitian ini lebih spesifik (mikro) dengan fokus pada Kedatuan Suppa serta menitikberatkan pada transformasi politik pasca islamisasi abad XVII. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap perubahan internal sistem kekuasaan di tingkat lokal.	kekuasaan serta interaksi antar kerajaan yang membentuk sistem politik di wilayah tersebut, sehingga memberikan konteks penting bagi posisi Kedatuan Suppa dalam jaringan politik regional.
5.	Muh. Ilham Majid, Abd. Rahim Yunus, Wahyuddin	Perkembangan Islam di Kedatuan	Penelitian tersebut lebih menitikberatkan	sama-sama mengkaji islamisasi di

	(2023)	Suppa Abad ke-17	pada perkembangan Islam dalam aspek sosial dan budaya serta bagaimana Islam menjadi bagian dari identitas masyarakat. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada transformasi politik pasca islamisasi, khususnya perubahan struktur kekuasaan, legitimasi politik, dan sistem pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya	Kedatuan Suppa pada abad XVII serta menggunakan pendekatan historis untuk memahami perubahan yang terjadi. Keduanya juga menyoroti peran penting penguasa, seperti Datu Suppa We Passulle Daeng Bulaeng, dalam proses penerimaan Islam, serta menunjukkan bahwa Islam berkembang melalui jalur perdagangan dan kemudian terintegrasi dalam kehidupan masyarakat.
--	--------	------------------	---	---

			dengan memberikan analisis yang lebih mendalam pada aspek politik yang belum banyak dikaji.	
--	--	--	---	--

G. Landasan Teori

1. Teori Islamisasi

Teori islamisasi menjelaskan proses masuk, berkembang, dan diterimanya ajaran Islam dalam suatu masyarakat, serta dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, budaya, dan politik.²⁵ Dalam kajian ilmiah, islamisasi tidak hanya dipahami sebagai perubahan dalam sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai proses transformasi nilai yang memengaruhi pola kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Para ahli seperti Azyumardi Azra dan Taufik Abdullah menekankan bahwa islamisasi di Nusantara berlangsung secara damai melalui jalur perdagangan, dakwah, dan interaksi sosial yang intens antara masyarakat lokal dengan para pedagang dan ulama Muslim.

Secara konseptual, islamisasi merupakan proses yang bersifat bertahap dan kontekstual. Setiap wilayah memiliki dinamika yang berbeda dalam menerima Islam, tergantung pada kondisi sosial, budaya, dan politik yang ada. Proses ini tidak berlangsung secara seragam, melainkan melalui tahapan-tahapan adaptasi yang memungkinkan masyarakat untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan tradisi lokal

²⁵Marti Widiya dan Alimni Alimni, "Sejarah Sosial Pendidikan Di Dunia Islam Proses Islamisasi Dan Penyebaran Islam Di Nusantara," *JPT: Jurnal Pendidikan Tematik* 4, no. 1 (2023): 17–30.

yang telah mengakar. Dalam hal ini, islamisasi tidak menghapus budaya lama secara keseluruhan, tetapi lebih pada proses integrasi antara nilai-nilai Islam dengan sistem budaya yang sudah ada.

Salah satu konsep penting dalam teori islamisasi adalah peran elite penguasa dalam mempercepat penyebaran Islam. Dalam banyak kasus di Nusantara, islamisasi dimulai dari kalangan penguasa atau bangsawan yang kemudian diikuti oleh masyarakat luas. Penerimaan Islam oleh elite politik memiliki dampak yang signifikan karena berimplikasi langsung pada perubahan dalam sistem legitimasi kekuasaan. Penguasa mulai mengaitkan kekuasaannya dengan nilai-nilai Islam, baik melalui penggunaan simbol keagamaan, penerapan norma Islam, maupun keterlibatan ulama dalam pemerintahan.

Lebih lanjut, islamisasi juga berperan dalam membentuk ulang struktur sosial dan politik masyarakat. Masuknya Islam membawa perubahan dalam sistem nilai yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan politik dan sosial. Hubungan antara penguasa dan masyarakat mengalami penyesuaian, di mana agama mulai menjadi salah satu faktor penting dalam membangun otoritas dan stabilitas kekuasaan. Dalam konteks ini, islamisasi tidak hanya berfungsi sebagai proses religius, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan politik yang signifikan.

Dalam konteks penelitian ini, teori islamisasi digunakan sebagai landasan untuk menganalisis bagaimana proses masuknya Islam di Kedatuan Suppa pada abad XVII serta bagaimana pengaruhnya terhadap perubahan sistem politik. Teori ini membantu menjawab rumusan masalah pertama mengenai proses islamisasi, sekaligus menjadi dasar untuk memahami rumusan masalah kedua terkait transformasi politik yang terjadi. Dengan demikian, teori islamisasi memberikan kerangka konseptual yang penting dalam menjelaskan hubungan antara agama dan perubahan kekuasaan dalam masyarakat Kedatuan Suppa.

2. Teori Fungsionalisme Struktural

Teori fungsionalisme struktural memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang tersusun atas berbagai bagian atau struktur yang saling berkaitan dan memiliki fungsi tertentu dalam menjaga keteraturan dan keseimbangan sosial. Setiap unsur dalam masyarakat seperti lembaga politik, agama, ekonomi, dan adat tidak berdiri sendiri, melainkan saling bergantung satu sama lain. Tokoh utama dalam teori ini, seperti Talcott Parsons, menekankan bahwa stabilitas sosial dapat terjaga apabila setiap bagian menjalankan fungsinya secara optimal dalam sistem tersebut.²⁶

Konsep inti dalam teori ini adalah adanya hubungan timbal balik antara struktur dan fungsi dalam masyarakat. Struktur merujuk pada pola-pola yang relatif tetap dalam organisasi sosial, sedangkan fungsi berkaitan dengan peran yang dijalankan oleh masing-masing struktur tersebut dalam menjaga keberlangsungan sistem. Parsons juga memperkenalkan kerangka AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency) sebagai syarat utama agar suatu sistem sosial dapat bertahan. Melalui kerangka ini, masyarakat dipahami sebagai sistem yang selalu berupaya menyesuaikan diri terhadap perubahan guna mempertahankan keseimbangan.²⁷

Dalam perspektif fungsionalisme struktural, perubahan sosial termasuk perubahan politik dipandang sebagai bagian dari proses penyesuaian sistem terhadap kondisi baru. Ketika suatu unsur baru masuk ke dalam masyarakat, seperti agama Islam, maka unsur-unsur lain dalam sistem akan mengalami penyesuaian agar keseimbangan tetap terjaga. Proses ini tidak selalu bersifat konflik, tetapi lebih kepada adaptasi yang bertahap, di mana nilai-nilai baru diintegrasikan ke dalam struktur yang sudah ada.

²⁶Mochamad Faidlul Abrori dan Mohammad Rofiq, "HUBUNGAN STRUKTUR DAN FUNGSI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL:(Tinjauan Teori Fungsional Struktural)," *JISI POL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 10, no. 1 (2026).

²⁷Akhmad Rizqi Turama, "Formulasi teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons," *EU FONI: Journal of Language, Literary and Cultural Studies* 2, no. 1 (2020): 58–69.

Lebih lanjut, teori ini juga menekankan bahwa perubahan dalam satu bagian akan memengaruhi bagian lain dalam sistem. Misalnya, perubahan dalam sistem kepercayaan akibat islamisasi akan berdampak pada sistem politik, terutama dalam hal legitimasi kekuasaan dan peran elite. Lembaga adat, yang sebelumnya menjadi sumber utama legitimasi, mulai berinteraksi dengan nilai-nilai Islam sebagai sumber legitimasi baru. Dengan demikian, terjadi penyesuaian dalam struktur kekuasaan dan hubungan sosial dalam masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, teori fungsionalisme struktural digunakan untuk menganalisis bagaimana islamisasi sebagai unsur baru memengaruhi struktur politik dan sosial di Kedatuan Suppa. Perubahan dalam legitimasi kekuasaan, peran elite, serta hubungan antara penguasa dan masyarakat dipahami sebagai bagian dari proses adaptasi sistem sosial dalam mencapai keseimbangan baru. Oleh karena itu, teori ini sangat relevan dalam menjawab rumusan masalah kedua, yaitu bagaimana bentuk dan dinamika transformasi politik yang terjadi pasca islamisasi di Kedatuan Suppa.

3. Teori Akulturasi

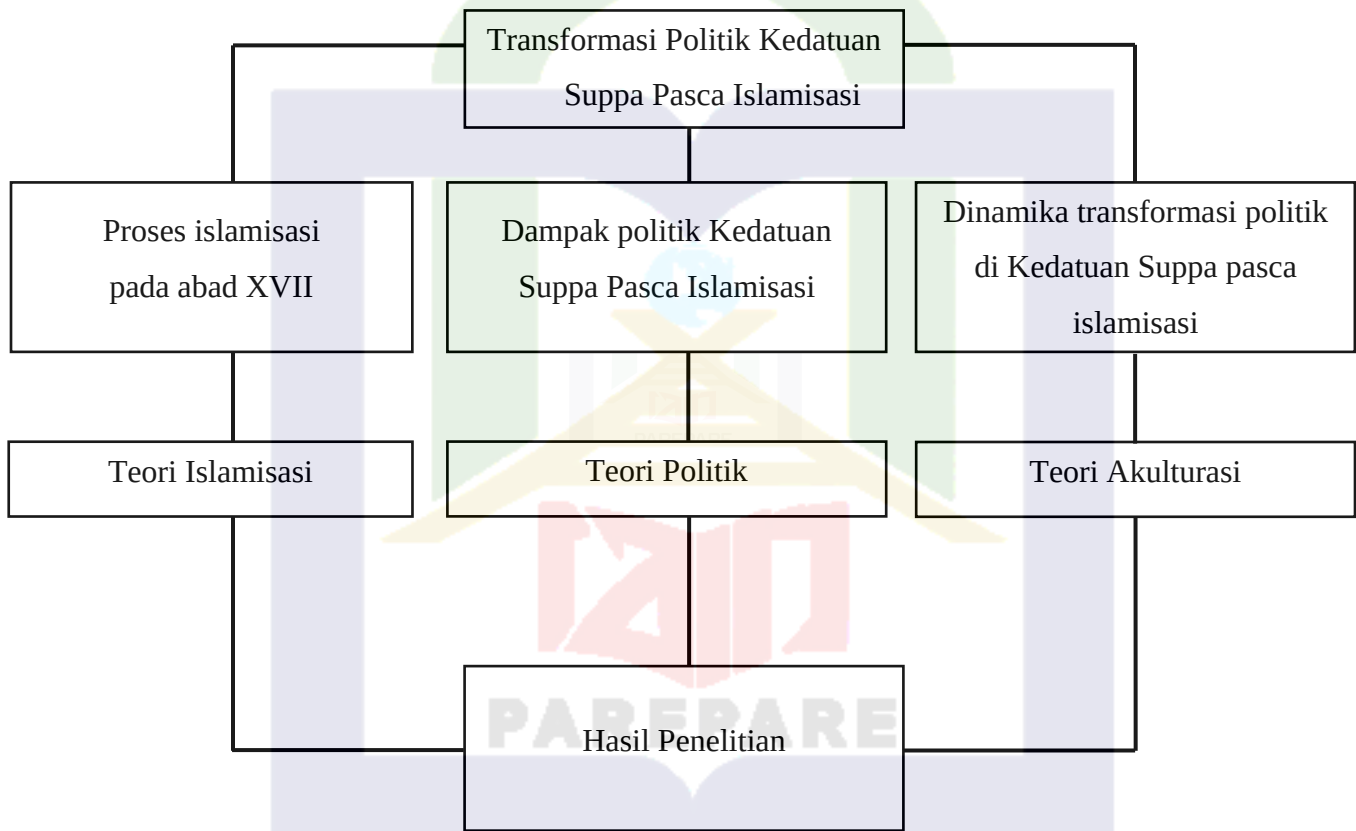
Teori akulturasi menjelaskan proses pertemuan dan percampuran antara dua budaya yang berbeda, di mana unsur-unsur budaya baru diterima dan diolah tanpa menghilangkan identitas budaya lama. Dalam konteks Nusantara, islamisasi sering kali berlangsung melalui proses akulturasi, di mana nilai-nilai Islam disesuaikan dengan tradisi lokal yang telah ada.

Konsep utama dalam teori ini adalah adanya interaksi antara budaya lokal dan budaya luar yang menghasilkan bentuk baru yang khas. Para ahli seperti Koentjaraningrat menjelaskan bahwa akulturasi memungkinkan terjadinya perubahan budaya secara selektif, di mana masyarakat menerima unsur baru yang dianggap sesuai dengan nilai yang telah ada. Proses ini sering menghasilkan sinkretisme atau perpaduan budaya yang unik.²⁸

²⁸J P Roszi dan M Mutia, "Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Keagamaan," *FOKUS* 3, no. 2 (2018): 171.

Dalam penelitian ini, teori akulturasi digunakan untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam berinteraksi dengan sistem adat dan politik di Kedatuan Suppa. Hal ini penting untuk menjelaskan bahwa transformasi politik tidak terjadi secara total, tetapi melalui proses penyesuaian antara tradisi lama dan nilai baru. Teori ini membantu menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga, terutama dalam memahami dinamika perubahan serta perbedaan pandangan dalam literatur.

H. Kerangka Pikir



I. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang menggunakan jenis penelitian *Library Research* (penelitian pustaka). Dimana cara pengumpulan datanya dengan membaca atau menganalisis buku-buku, jurna, skripsi, media internet serta literatur naskah yang telah ditransliterasi atau diterjemahkan yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitiannya. Dari hasil bacaan tersebut akan ditulis atau dirangkum dalam bentuk tulisan, baik berupa kutipan langsung atau ikhtisar penulis. Sehingga dapat diketahui bagaimana peristiwa dan perubahan yang terjadi pada Abad XVII, terutama terkait Transformasi Politik Kedatuan Suppa Pasca Islamisasi. Melalui kajian ini, kita dapat memahami bagaimana kondisi politik pasca islamisasi di Kedatuan Suppa pada masa tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Historis

Pengertian yang lebih komprehensif, sejarah adalah “kisah dan peristiwa masa lampau umat manusia”. Menurut Kuntowijoyo peristiwa sejarah itu mencakup segala yang dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami oleh manusia.²⁹ Pendekatan historis ini digunakan untuk mengenali fakta-fakta serta menyusun kesimpulan mengenai kejadian-kejadian penting pada masa lalu. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut membantu peneliti memahami dinamika proses perubahan Politik Pasca Islamisasi di Kedatuan Suppa pada Abad XVII.

²⁹Abdurrahman Dudung, “Metodologi penelitian sejarah Islam,” *Ombak, Yogyakarta* 1 (2011).hlm.1

b. Pendekatan Polotik

Politik merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana kekuasaan dibentuk dan dibagi dalam masyarakat, termasuk proses pengambilan keputusan di dalam suatu negara.³⁰ Dalam dinamika politik, kepemimpinan sering dipandang sebagai faktor penentu karena menjadi tolok ukur dalam melihat arah kebijakan yang diambil.³¹ Oleh karena itu, penulis menggunakan pendekatan politik untuk memahami bagaimana kekuasaan berfungsi, bagaimana hukum dikembangkan, serta bagaimana kebijakan-kebijakan tertentu ditetapkan oleh penguasa. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut membantu memahami bagaimana kekuasaan, struktur pemerintahan, serta legitimasi politik mengalami perubahan akibat masuknya Islam. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis relasi kekuasaan antara penguasa dan masyarakat, serta bagaimana sistem politik tradisional beradaptasi dengan nilai-nilai baru yang dibawa oleh agama.³²

c. Pendekatan Sosial

Pendekatan sosial digunakan untuk membantu memahami berbagai proses sosial yang berkaitan dengan hubungan sebab-akibat antara pergerakan sosial dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Weber menjelaskan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang berupaya memahami masyarakat serta perubahan-perubahan di dalamnya.³³ Melalui pendekatan sosial, penelitian ini mengkaji bagaimana islamisasi memengaruhi pola hubungan dalam masyarakat, seperti hubungan antara penguasa dan rakyat, antar kelompok sosial, serta peran tokoh agama dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan nilai-

³⁰Dina Rahayu R, “Dampak Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz Terhadap Perkembangan Sosial Politik Islam (99-101 H/717-720 M)” (IAIN Parepare, 2020).

³¹Dina Rahayu R, “Dampak Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz Terhadap Perkembangan Sosial Politik Islam (99-101 H/717-720 M)” hlm.19

³²A Prayogi, “Pendekatan Kualitatif dalam Ilmu Sejarah,” *Historia Madania* 5, no. 2 (2021): 240–54.

³³Baharuddin, *Pengantar Sosiologi* (Sanabil, 2021).

nilai keagamaan turut membentuk norma baru yang memengaruhi perilaku sosial dan tatanan kehidupan masyarakat Kedatuan Suppa.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif historis. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk uraian, penjelasan, pendapat, serta fakta-fakta historis, bukan dalam bentuk angka atau statistik. Dalam penelitian kepustakaan (*library research*) ini, data diperoleh melalui penelaahan berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan transformasi politik Kedatuan Suppa pasca Islamisasi abad XVII.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber utama yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, seperti lontarak, arsip sejarah, naskah, serta buku-buku yang membahas secara khusus sejarah Islamisasi dan dinamika politik kerajaan-kerajaan Bugis, khususnya Kedatuan Suppa dan konfederasi Ajatappareng.

Sementara itu, data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah seperti buku, jurnal akademik, artikel penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan sumber digital yang relevan dengan tema penelitian. Data sekunder berfungsi untuk memperkuat interpretasi dan analisis terhadap sumber primer, terutama dalam memahami konsep transformasi politik, teori Islamisasi, serta dinamika sosial-politik masyarakat Bugis-Makassar³⁴. Dengan memanfaatkan data primer dan sekunder secara terpadu, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang lebih komprehensif, sistematis, dan ilmiah mengenai transformasi politik Kedatuan Suppa pasca Islamisasi abad XVII.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam studi kepustakaan (*library study*) melibatkan pencarian dan analisis terhadap sumber-sumber informasi yang ada dalam bentuk literatur, jurnal ilmiah, buku, laporan riset, dokumen resmi, dan materi lain yang

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 104.

relevan dengan topik penelitian.³⁵ Adapun teknik dalam pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Heuristik

Heuristik atau teknik mencari dan megumpulkan sumber-sumber yang terkait dengan penelitian. Penentuan sumber sejarah akan mempengaruhi tempat, dimana, siapa dan cara menemukan sumber-sumber tersebut. Penulis mengumpulkan sumber-sumber dari artikel, buku, jurnal, skripsi, tesis maupun sumber informasi di internet yang relevan dengan penelitian ini.

Berdasarkan kajian penulis terdapat beberapa rujukan buku yang terkait dengan Transformasi Politik Kedatuan Suppa Pasca Islamisasi Abad XVII, yaitu Ahmad Yani (2020) Islamisasi di Ajatappareng Abad XVI–XVII, Muhammad Amir (2019) Konflik Dan Relasi Kekuasaan Di Ajatappareng 1905-1942 (Conflict And Power Relations On Ajatappareng 1905-1942), Ahmad Yani, Ahmad Zulfikar, Susi Mako, Mirnanini Mirnanini (2024) Penerimaan dan Perkembangan Islam di Kerajaan Suppa Abad ke-17, Khaeruddin Dinamika Politik Kerajaan Kerajaan Lokal di Sulawesi Selatan : Dari Persekutuan Diplomasi Hingga Konfrontasi Perebutan Superioritas (Abad XV-XVII), Muh. Ilham Majid, Abd. Rahim Yunus, Wahyuddin (2023) Perkembangan Islam di Kedatuan Suppa Abad ke-17.

Pada tahap ini penulis mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian ini.

b. Verifikasi/ Kritik Sumber

Setelah sumber data dikumpulkan dalam teknik pengumpulan data, tahapan selanjutnya adalah verifikasi atau kritik sumber. Tahap ini dilakukan untuk menguji kredibilitas dan orientasi agar memperoleh sumber data yang dapat dipercaya kaeabsahannya. Verivikasi itu terdapat dua macam yaitu:

³⁵ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)* (Jakarta: GP Press, 2018).

1) Autentitas

Autentitas sumber ini minial diuji berdasarkan lima pertanyaan yaitu, kapan sumber dibuat, dimana sumber dibuat, siapa yang membuat, dari bahan apa sumber dibuat, dan apakah sumber itu dalam bentuk asli. Jika data yang ditemukan dalam bentuk naskah lokal, maka data tersebut harus diteliti baik kertasnya, tintanya, gaya tulisannya, kalimatnya, ungkapannya, hurupnya dan seluruh tampilannya.³⁶

Analisis Jurnal “Islamisasi di Ajatappareng Abad XVI–XVII”

Keaslian Jurnal	Asli
Penerbit	Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan 2020
Nama Penulis	Ahmad Yani
Latar Belakang Penulis	Ahmad Yani adalah sebagai akademisi/peneliti di bidang sejarah, khususnya sejarah Islam di Nusantara. Ia memiliki fokus kajian pada proses islamisasi dan interaksi antara Islam dengan budaya lokal, serta menggunakan metode penelitian sejarah yang sistematis.

Analisis Jurnal “Konflik Dan Relasi Kekuasaan Di Ajatappareng 1905-1942 (Conflict And Power Relations On Ajatappareng 1905-1942)”

Keaslian Jurnal	Asli
Penerbit	Jurnal Walasuji (Jurnal Sejarah dan Budaya)2019
Nama Penulis	Muhammad Amir
Latar Belakang Penulis	Latar belakang Muhammad Amir adalah sebagai akademisi atau peneliti di bidang sejarah, khususnya sejarah lokal Sulawesi Selatan. Ia memiliki fokus kajian pada dinamika politik, konflik kekuasaan,

³⁶Metodologi Sejarah Kuntowijoyo, “Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta: PT,” *Tiara Wacana*, 2013.

	dan hubungan antara pemerintah kolonial dengan penguasa lokal. Dengan latar belakang keilmuan sejarah, ia menggunakan metode penelitian historis secara sistematis untuk mengkaji perubahan struktur kekuasaan dalam masyarakat.
--	--

Analisis Jurnal “Dinamika Politik Kerajaan Kerajaan Lokal di Sulawesi Selatan : Dari Persekutuan Diplomasi Hingga Konfrontasi Perebutan Superioritas (Abad XV-XVII)”

Keaslian Jurnal	Asli
Penerbit	Yupa Historical Studies Journal 2022
Nama Penulis	Khaeruddin
Latar Belakang Penulis	Khaeruddin merupakan akademisi di bidang sejarah yang fokus pada kajian politik dan kerajaan lokal di Sulawesi Selatan. Ia berlatar belakang ilmu sejarah dan menggunakan metode historis untuk menganalisis dinamika kekuasaan dan hubungan antar kerajaan pada masa pra-kolonial.

2) Kredibilitas

Ketika sudah menemukan bahwa data itu autentik, maka akan diteliti apakah dokumen tersebut dapat dipercaya agar tidak terjadi kekeliruan dalam sumber informasi. Salah satu sumber utama yang memperkuat kredibilitas penelitian ini adalah karya Leonard Y. Andaya berjudul *The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi in the Seventeenth Century*

(1981). Buku ini merupakan karya klasik dalam studi sejarah Sulawesi Selatan yang ditulis oleh sejarawan internasional dan diterbitkan oleh penerbit akademik bereputasi. Andaya menyajikan analisis mendalam mengenai dinamika politik, konflik antar kerajaan, serta pengaruh kekuatan eksternal pada abad XVII. Relevansi buku ini terletak pada kemampuannya memberikan gambaran konteks historis yang luas, sehingga membantu peneliti dalam memahami posisi Kedatuan Suppa dalam jaringan politik regional serta proses perubahan kekuasaan pada masa tersebut.

Selain itu, buku Christian Pelras berjudul *The Bugis* (1996) juga menjadi rujukan penting dalam penelitian ini. Karya ini dikenal luas sebagai salah satu studi antropologi paling komprehensif mengenai masyarakat Bugis. Pelras tidak hanya membahas aspek budaya, tetapi juga menjelaskan secara rinci struktur sosial, konsep kekuasaan, sistem kedatuan, serta nilai-nilai adat yang menjadi dasar legitimasi politik. Buku ini sangat penting dalam memberikan landasan teoritis untuk memahami bagaimana sistem kekuasaan tradisional bekerja sebelum dan sesudah masuknya Islam, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis perubahan yang terjadi dalam struktur politik Kedatuan Suppa.

Dengan mengacu pada kedua karya tersebut, penelitian ini memiliki fondasi teoritis dan empiris yang kuat. Integrasi antara sumber sejarah dan kajian antropologi memungkinkan peneliti untuk melihat transformasi politik tidak hanya sebagai peristiwa historis, tetapi juga sebagai proses sosial yang kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya kajian sejarah lokal, khususnya terkait dinamika politik Kedatuan Suppa pasca islamisasi abad XVII.

c. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran sejarah terhadap data melalui analisis. Interpretasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan data guna

menyingkap peristiwa-peristiwa mana yang terjadi dalam waktu yang bersamaan.³⁷ Jadi, tahap interpretasi dilakukan untuk menganalisis peristiwa serta kausalitas dalam sejarah. Dalam tahap ini, digunakan dua metode sebagai berikut:

- 1) Metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian yang berjudul “*Transformasi Politik Kedatuan Suppa Pasca Islamisasi Abad XVII*”, peneliti terlebih dahulu mengkaji berbagai sumber sejarah seperti naskah lontara, buku, dan jurnal yang menjelaskan proses islamisasi, perubahan struktur pemerintahan, serta peran elite penguasa di Kedatuan Suppa. Dari fakta-fakta tersebut kemudian ditarik kesimpulan umum mengenai pola transformasi politik yang terjadi setelah masuknya Islam.
- 2) Metode deduktif, yaitu berangkat dari teori-teori yang bersifat umum untuk menjelaskan kejadian-kejadian yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini, peneliti memulai dengan konsep umum mengenai islamisasi, sistem kedatuan, dan teori transformasi politik, kemudian mengaplikasikannya untuk menjelaskan perubahan yang terjadi secara spesifik di Kedatuan Suppa, seperti perubahan legitimasi kekuasaan dan integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem pemerintahan.
- 3) Metode komparatif, yaitu menganalisis dengan membandingkan data atau pendapat ahli antara satu dengan yang lainnya, kemudian menarik sebuah kesimpulan.

d. Historiografi

Secara etimologi, historiografi berasal dari bahasa Yunani yaitu *historia* dan *grafein*. *Historia* berarti menyelidiki tentang gejala alam fisik (*physicalresearch*) sedangkan, *grafein* berarti gambaran, likisan, tulisan aatau

³⁷ Dudung, “Metodologi penelitian sejarah Islam.”

uraian (*discription*). Dengan demikian, historiografi dapat diartikan sebagai uraian atau tulisan tentang hasil penelitian mengenai gejala alam.³⁸

Jenis Historiografi dalam penulisan ini adalah termasuk dalam historiografi modern karena menggunakan metode penelitian. Historiografi merupakan tahap akhir dalam rangkaian metode penelitian sejarah. Dengan merekonstruksi data dari sumber-sumber yang telah diseleksi lalu dituangkan dalam bentuk tulisan sejarah atau laporan hasil penelitian sejarah. Tahap akhir ini akan menyajikan hasil penelitian tentang “Transformasi Politik Keadatan Suppa Pasca Islamisasi Abad XVII” dengan menggunakan teknik deskripsi, narasi dan analisis.

³⁸H Sulasman dan M Hum, “Metodologi penelitian sejarah,” *Bandung: Pustaka Setia*, 2014.

BAB II

PROSES ISLAMISASI DI KEDATUAN SUPPA ABAD XVII

A. Kondisi Kedatuan Suppa Sebelum Islamisasi

Kedatuan Suppa merupakan salah satu kerajaan pesisir yang memiliki peranan penting dalam perkembangan politik dan perdagangan di kawasan barat Sulawesi Selatan sebelum masuknya Islam pada awal abad XVII. Secara geografis, wilayah Suppa terletak di pesisir Selat Makassar yang menghubungkan jalur pelayaran antara bagian barat Nusantara dengan kawasan timur Indonesia. Letak tersebut menjadikan Suppa sebagai pelabuhan transit bagi para pedagang dari berbagai daerah seperti Melayu, Jawa, Kalimantan, Maluku, bahkan pedagang asing yang berasal dari Arab dan Tiongkok³⁹. Kondisi geografis ini menyebabkan Kedatuan Suppa berkembang lebih awal dibandingkan beberapa kerajaan pedalaman karena memiliki akses langsung terhadap aktivitas perdagangan internasional. Posisi strategis tersebut sekaligus membentuk karakter politik Suppa sebagai kerajaan maritim yang sangat bergantung pada stabilitas hubungan dagang dan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan maupun di luar wilayah tersebut.

Keunggulan geografis Kedatuan Suppa tidak hanya memberikan keuntungan dalam bidang ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi politiknya di kawasan Ajatappareng. Sebagai kerajaan pesisir, Suppa berfungsi sebagai pintu keluar masuk komoditas hasil bumi dari wilayah pedalaman seperti beras, hasil hutan, serta berbagai produk pertanian yang diperdagangkan melalui pelabuhan-pelabuhan pesisir. Aktivitas perdagangan tersebut kemudian menciptakan hubungan politik yang erat antara penguasa pesisir dengan kerajaan-kerajaan agraris di pedalaman. Dengan demikian, kekuatan politik Kedatuan Suppa sebelum Islamisasi tidak hanya dibangun melalui kemampuan militernya, tetapi juga melalui penguasaan jalur perdagangan

³⁹Leonard Y. Andaya, *The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi in the Seventeenth Century* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1981), hlm. 25–30.

yang mampu memperluas jaringan diplomasi serta meningkatkan legitimasi ekonomi kerajaan di kawasan Sulawesi Selatan.

Sistem pemerintahan Kedatuan Suppa sebelum Islamisasi pada dasarnya mengikuti pola pemerintahan tradisional masyarakat Bugis yang menempatkan Datu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kedudukan seorang Datu bukan sekadar pemimpin administratif, tetapi juga berfungsi sebagai simbol persatuan masyarakat, pelindung adat (*pangadereng*), serta penanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Dalam menjalankan pemerintahan, Datu tidak memerintah secara absolut, melainkan dibantu oleh para bangsawan, pemangku adat, dan dewan penasihat yang memiliki kewenangan memberikan pertimbangan terhadap berbagai keputusan politik. Sistem pemerintahan seperti ini menunjukkan bahwa sejak awal masyarakat Bugis telah mengenal mekanisme musyawarah sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan politik, sehingga kekuasaan raja tetap dibatasi oleh norma adat yang berlaku di tengah masyarakat.

Dalam praktiknya, pemerintahan Kedatuan Suppa berlandaskan pada sistem pangadereng, yaitu seperangkat norma adat yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat Bugis. Pangadereng meliputi unsur *ade'* (adat), *bicara* (peradilan), *rapang* (preseden atau contoh hukum), dan *wari'* (pengaturan status sosial). Sebelum Islam masuk, keempat unsur tersebut menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelesaian konflik di lingkungan kerajaan⁴⁰. Setiap kebijakan politik yang diambil oleh Datu harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan kerajaan dengan ketentuan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, legitimasi kekuasaan seorang penguasa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kemampuannya menjaga keberlangsungan pangadereng sebagai fondasi kehidupan masyarakat Bugis.

Selain struktur pemerintahan yang berlandaskan adat, Kedatuan Suppa juga menerapkan sistem birokrasi tradisional yang melibatkan para pejabat kerajaan

⁴⁰ Christian Pelras, *The Bugis* (Oxford: Blackwell Publishers, 1996), hlm. 188–203.

berdasarkan fungsi dan kedudukannya masing-masing. Para bangsawan memegang peranan penting sebagai penghubung antara Datu dengan masyarakat di wilayah-wilayah kekuasaan. Mereka bertugas mengelola administrasi kerajaan, mengawasi daerah bawahan, mengatur distribusi hasil perdagangan, serta memimpin pasukan ketika terjadi konflik⁴¹. Model pemerintahan demikian mencerminkan bahwa struktur politik Kedatuan Suppa sebelum Islamisasi telah memiliki organisasi yang relatif kompleks meskipun belum mengenal lembaga-lembaga keagamaan sebagaimana berkembang setelah Islam diterima sebagai agama kerajaan.

Dari sisi struktur sosial, masyarakat Bugis di Kedatuan Suppa tersusun berdasarkan sistem stratifikasi yang cukup jelas. Lapisan tertinggi ditempati oleh golongan bangsawan (*ana' arung*) yang memiliki hak memegang jabatan pemerintahan dan memimpin masyarakat. Di bawahnya terdapat golongan masyarakat merdeka (*to maradeka*) yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, nelayan, pedagang, dan pengrajin. Sementara itu, lapisan terbawah terdiri atas kelompok ata atau hamba sahaya yang umumnya bekerja pada keluarga bangsawan atau diperoleh melalui peperangan maupun hubungan utang-piutang. Struktur sosial tersebut menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Bugis sebelum Islam telah mengenal pembagian status sosial yang memengaruhi hak politik, akses ekonomi, serta peluang seseorang untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan.

Meskipun masyarakat Bugis mengenal sistem stratifikasi sosial yang tegas, hubungan antara setiap lapisan masyarakat tetap diikat oleh nilai-nilai budaya seperti sipakatau, sipakainge, dan sipakalebbi yang menekankan penghormatan terhadap sesama manusia. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus memperkuat loyalitas masyarakat kepada penguasa. Dalam konteks politik, keberhasilan seorang Datu tidak hanya diukur dari kemampuannya mengendalikan wilayah kekuasaan, tetapi juga dari kemampuannya menjaga harmoni antara bangsawan, masyarakat umum, dan kelompok adat. Oleh sebab itu, stabilitas politik

⁴¹ Mattulada, *Latoa*, hlm. 162–175

Kedatuan Suppa sebelum Islamisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan elite kerajaan dalam mempertahankan keseimbangan hubungan sosial tersebut.

Legitimasi kekuasaan di Kedatuan Suppa sebelum Islamisasi bertumpu pada kepercayaan adat yang menghubungkan asal-usul penguasa dengan konsep To Manurung. Dalam tradisi Bugis, To Manurung dipahami sebagai sosok yang dipercaya turun dari dunia atas (*boting langi*)⁴² untuk membawa ketertiban dan membentuk sistem pemerintahan pertama di suatu wilayah. Meskipun tidak semua kerajaan Bugis memiliki kisah To Manurung yang sama, konsep tersebut menjadi simbol penting bahwa kekuasaan seorang raja memperoleh legitimasi yang bersifat sakral. Dengan demikian, kewibawaan penguasa tidak hanya berasal dari garis keturunan bangsawan, tetapi juga dari keyakinan masyarakat bahwa ia memiliki hubungan spiritual dengan leluhur dan kekuatan adikodrati.

Konsep To Manurung kemudian berkembang menjadi dasar ideologis dalam pembentukan sistem politik Bugis sebelum Islam. Seorang Datu dianggap memiliki hak memerintah karena berasal dari garis keturunan yang sah menurut adat, sehingga pergantian kekuasaan lebih banyak ditentukan oleh silsilah keluarga kerajaan dibandingkan proses pemilihan. Akan tetapi, legitimasi tersebut tetap harus dibuktikan melalui kemampuan menjaga kesejahteraan masyarakat dan menegakkan pangadereng. Apabila seorang penguasa dianggap melanggar adat atau gagal memenuhi kewajibannya, maka dukungan politik dari para bangsawan maupun masyarakat dapat melemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi politik masyarakat Bugis sebenarnya merupakan perpaduan antara legitimasi genealogis dan legitimasi moral berdasarkan pelaksanaan adat.

Dalam hubungan politik regional, Kedatuan Suppa merupakan salah satu anggota Konfederasi Ajatappareng yang terdiri atas lima kerajaan besar, yakni Suppa, Sawitto, Sidenreng, Rappang, dan Alitta⁴³. Konfederasi ini dibentuk atas dasar

⁴² Mattulada, *Latoa*, hlm. 34–48.

⁴³ Ahmad Yani, "Islamisasi di Ajatappareng Abad XVI–XVII," *Pusaka: Jurnal Khazanah Keagamaan* 8, no. 2 (2020): 145–160; Khaeruddin, "Dinamika Politik Kerajaan-Kerajaan Lokal di

kepentingan politik, ekonomi, dan pertahanan bersama guna menjaga stabilitas kawasan dari ancaman kerajaan lain. Masing-masing kerajaan tetap mempertahankan kedaulatannya, tetapi dalam berbagai persoalan strategis mereka membangun kerja sama melalui hubungan kekerabatan, diplomasi, perdagangan, serta persekutuan militer. Kedudukan Suppa sebagai kerajaan pesisir menjadikannya memiliki fungsi strategis sebagai pusat perdagangan yang mendukung kebutuhan ekonomi kerajaan-kerajaan anggota konfederasi lainnya.

Hubungan politik dalam Konfederasi Ajatappareng memperlihatkan bahwa sebelum Islamisasi telah berkembang sistem kerja sama antarkerajaan yang relatif mapan. Persekutuan tersebut memungkinkan terjadinya pertukaran komoditas, penyelesaian konflik secara diplomatis, serta pembentukan keseimbangan kekuasaan di kawasan Sulawesi Selatan. Kondisi politik inilah yang kemudian menjadi landasan penting bagi proses Islamisasi pada abad XVII. Ketika Islam diterima oleh elite penguasa, jaringan politik Ajatappareng turut menjadi media percepatan penyebaran agama baru sekaligus mendorong terjadinya transformasi sistem pemerintahan di Kedatuan Suppa. Dengan demikian, kondisi Kedatuan Suppa sebelum Islamisasi menunjukkan bahwa perubahan politik pada abad XVII bukan terjadi dalam ruang yang kosong, melainkan berlangsung di atas fondasi sosial, budaya, dan politik yang telah terbentuk secara kuat sejak masa pra-Islam.

B. Jalur dan Faktor Islamisasi Kedatuan Suppa

Islamisasi di Kedatuan Suppa tidak berlangsung secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses interaksi yang panjang antara masyarakat lokal dengan dunia luar melalui berbagai jalur, terutama perdagangan, diplomasi, dan aktivitas dakwah⁴⁴. Sebagai salah satu kerajaan pesisir yang berada di kawasan barat Sulawesi

Sulawesi Selatan: Dari Persekutuan Diplomasi hingga Konfrontasi Perebutan Superioritas (Abad XV–XVII)," *Yupa: Historical Studies Journal* (2022): 83–98.

⁴⁴Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680*, Vol. I (New Haven: Yale University Press, 1988), hlm. 61–74; Leonard Y. Andaya, *The Heritage of Arung Palakka: A*

Selatan, Kedatuan Suppa memiliki posisi geografis yang sangat strategis dalam jaringan perdagangan maritim Nusantara. Posisi tersebut menjadikan wilayah Suppa sebagai tempat persinggahan berbagai kapal dagang yang berlayar dari kawasan barat Nusantara menuju Maluku sebagai pusat perdagangan rempah-rempah maupun sebaliknya. Sejak abad XV, pelabuhan-pelabuhan di kawasan Ajatappareng telah ramai dikunjungi oleh pedagang dari Melayu, Jawa, Kalimantan, Aceh, Gujarat, Arab, hingga Tiongkok. Intensitas perdagangan tersebut tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi kerajaan, tetapi juga membuka ruang terjadinya pertukaran budaya, bahasa, pengetahuan, dan agama di tengah masyarakat pesisir.

Dalam konteks sejarah Islam di Nusantara, jalur perdagangan merupakan media yang paling efektif dalam memperkenalkan ajaran Islam karena para pedagang Muslim tidak hanya membawa komoditas dagang, tetapi juga membawa identitas keagamaan, etika bisnis, serta tradisi sosial yang perlahan diterima oleh masyarakat setempat. Kondisi demikian menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat dengan proses penyebaran agama, sehingga perkembangan Islam di Kedatuan Suppa tidak dapat dipisahkan dari peran perdagangan internasional yang berkembang pesat di kawasan Selat Makassar.

Perdagangan maritim yang berkembang di Kedatuan Suppa memberikan dampak yang lebih luas dibandingkan sekadar peningkatan aktivitas ekonomi kerajaan. Melalui hubungan dagang yang berlangsung secara terus-menerus, masyarakat Suppa mulai mengenal komunitas-komunitas Muslim yang berasal dari berbagai pusat perdagangan Islam di Asia Tenggara⁴⁵. Para pedagang tersebut umumnya menetap sementara di sekitar pelabuhan untuk melakukan transaksi perdagangan sambil membangun hubungan sosial dengan penduduk lokal. Hubungan tersebut berkembang melalui interaksi sehari-hari, perkawinan dengan perempuan

History of South Sulawesi in the Seventeenth Century (The Hague: Martinus Nijhoff, 1981), hlm. 25–35.

⁴⁵Christian Pelras, *The Bugis* (Oxford: Blackwell Publishers, 1996), hlm. 131–145; Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680*, Vol. I, hlm. 168–176.

setempat, pembentukan permukiman dagang, hingga kerja sama ekonomi dengan elite kerajaan.

Pola penyebaran Islam melalui pendekatan sosial seperti ini menyebabkan masyarakat Bugis tidak memandang Islam sebagai ancaman terhadap adat istiadat mereka, melainkan sebagai ajaran baru yang dapat hidup berdampingan dengan sistem sosial yang telah berkembang sebelumnya. Anthony Reid menjelaskan bahwa perkembangan kota-kota pelabuhan di Asia Tenggara pada abad XV hingga XVII memperlihatkan hubungan yang sangat erat antara kemajuan perdagangan dengan penyebaran Islam, karena pusat-pusat perdagangan berfungsi sebagai simpul utama pertukaran ide dan kebudayaan. Oleh sebab itu, jalur perdagangan di Kedatuan Suppa menjadi faktor awal yang membentuk lingkungan sosial yang kondusif bagi berkembangnya Islam sebelum diterima secara resmi oleh elite kerajaan.

Selain perdagangan, faktor penting lain yang mempercepat proses Islamisasi di Kedatuan Suppa adalah keterbukaan elite politik terhadap hubungan eksternal. Sebagai kerajaan maritim yang aktif menjalin kerja sama dengan berbagai kerajaan di Sulawesi Selatan maupun kawasan Nusantara lainnya, para penguasa Suppa memiliki kepentingan untuk mempertahankan stabilitas hubungan dagang dan diplomasi. Dalam situasi tersebut, penerimaan terhadap agama Islam tidak hanya dipahami sebagai persoalan keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi politik untuk memperkuat posisi kerajaan di tengah perubahan konstelasi kekuasaan regional.

Masuknya Islam ke berbagai pusat perdagangan di Nusantara menjadikan agama ini memiliki nilai strategis karena mampu menghubungkan kerajaan-kerajaan Muslim ke dalam jaringan perdagangan dan diplomasi yang lebih luas. Oleh karena itu, sebelum Islam diterima secara resmi oleh Datu Suppa, masyarakat dan elite kerajaan telah lebih dahulu berinteraksi dengan nilai-nilai Islam melalui hubungan ekonomi dan politik yang berlangsung selama beberapa dekade. Ahmad Yani menjelaskan bahwa proses Islamisasi di kawasan Ajatappareng berlangsung secara bertahap melalui hubungan perdagangan dan jaringan kekerabatan antarkerajaan, bukan melalui penaklukan militer. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa

keberhasilan penyebaran Islam di Kedatuan Suppa merupakan hasil dari kombinasi antara keterbukaan masyarakat pesisir, kepentingan politik elite kerajaan, dan intensitas hubungan perdagangan internasional yang telah berkembang sejak masa pra-Islam.

C. Proses Penerimaan Islam oleh Kedatuan Suppa

Proses penerimaan Islam di lingkungan elite Kedatuan Suppa merupakan tahapan penting dalam sejarah Islamisasi di kawasan Ajatappareng. Berbeda dengan penyebaran Islam di beberapa wilayah lain yang berlangsung melalui ekspansi politik, Islam di Kedatuan Suppa berkembang melalui pendekatan persuasif yang melibatkan hubungan perdagangan, diplomasi, dan komunikasi antara ulama dengan kalangan bangsawan. Sebelum Islam diterima sebagai agama resmi kerajaan, para elite Suppa telah menjalin hubungan yang cukup intensif dengan kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi Selatan maupun dengan para pedagang Muslim dari luar Nusantara⁴⁶. Interaksi tersebut menyebabkan ajaran Islam terlebih dahulu dikenal di lingkungan istana sebelum menyebar secara luas kepada masyarakat. Dengan demikian, penerimaan Islam oleh kalangan elite menjadi titik awal perubahan sistem politik dan pemerintahan di Kedatuan Suppa.

Lingkungan istana memiliki peranan yang sangat menentukan dalam proses Islamisasi karena keputusan politik seorang penguasa akan memengaruhi arah kebijakan kerajaan secara keseluruhan. Dalam sistem pemerintahan Bugis, Datu memiliki otoritas yang kuat dalam menentukan kebijakan politik maupun keagamaan. Oleh karena itu, ketika ajaran Islam mulai diperkenalkan kepada kalangan bangsawan, proses penerimaannya berlangsung melalui berbagai dialog mengenai nilai-nilai keagamaan, etika kepemimpinan, dan tata pemerintahan. Pendekatan yang dilakukan oleh para ulama tidak bertujuan menghapus adat yang telah berkembang,

⁴⁶Ahmad Yani, "Islamisasi di Ajatappareng Abad XVI–XVII," *Pusaka: Jurnal Khazanah Keagamaan* 8, no. 2 (2020): 145–160.

melainkan memperkenalkan Islam sebagai ajaran yang mampu memperkuat sistem sosial dan politik yang telah ada.

Salah satu tokoh penting dalam proses penerimaan Islam di Kedatuan Suppa adalah We Passulle Daeng Bulaeng, yang dikenal sebagai penguasa Suppa pada masa awal Islamisasi⁴⁷. Dalam berbagai sumber sejarah lokal disebutkan bahwa We Passulle Daeng Bulaeng memiliki peran besar dalam membuka ruang bagi berkembangnya ajaran Islam di lingkungan kerajaan. Sebagai pemimpin, ia menunjukkan sikap terbuka terhadap perubahan yang berkembang di kawasan Sulawesi Selatan, terutama setelah Islam mulai diterima oleh Kerajaan Gowa. Sikap tersebut menjadi salah satu faktor yang mempercepat proses penerimaan Islam oleh kalangan bangsawan dan pejabat kerajaan.

Peran We Passulle Daeng Bulaeng tidak hanya terbatas pada penerimaan pribadi terhadap Islam, tetapi juga pada kebijakan politik yang mendukung berkembangnya agama tersebut di wilayah kekuasaannya. Dukungan elite kerajaan memberikan legitimasi bagi para ulama untuk melaksanakan dakwah secara lebih luas kepada masyarakat⁴⁸. Selain itu, penerimaan Islam oleh penguasa turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ajaran baru tersebut karena dalam tradisi politik Bugis, keputusan seorang Datu sering dijadikan pedoman oleh rakyat. Oleh sebab itu, Islamisasi di Kedatuan Suppa berlangsung secara bertahap tanpa menimbulkan pertentangan yang berarti antara elite kerajaan dan masyarakat.

Masuknya Islam ke lingkungan istana kemudian diikuti oleh pengakuan Islam sebagai agama kerajaan. Perubahan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap sistem pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat. Islam mulai dijadikan sebagai dasar moral dalam penyelenggaraan pemerintahan, sementara nilai-nilai adat tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya Bugis. Dengan demikian, proses Islamisasi di Kedatuan Suppa

⁴⁷ Ahmad Yani, Ahmad Zulfikar, Susi Mako, dan Mirnanini, "Penerimaan dan Perkembangan Islam di Kerajaan Suppa Abad ke-17," (2024), hlm. 35–42.

⁴⁸ Muh. Ilham Majid, Abd. Rahim Yunus, dan Wahyuddin, "Perkembangan Islam di Kedatuan Suppa Abad ke-17," (2023), hlm. 57–63.

memperlihatkan adanya pola integrasi antara syariat Islam dengan sistem adat yang telah berkembang sebelumnya.

Penerimaan Islam sebagai agama kerajaan juga memperkuat hubungan politik Kedatuan Suppa dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Sulawesi Selatan. Kesamaan identitas keagamaan membuka peluang bagi terjalinnya kerja sama dalam bidang perdagangan, diplomasi, maupun pertahanan. Hubungan tersebut semakin memperkuat posisi Kedatuan Suppa dalam jaringan politik regional, khususnya setelah Gowa berkembang sebagai pusat kekuasaan Islam di Sulawesi Selatan⁴⁹. Dalam konteks ini, Islam tidak hanya berfungsi sebagai agama, tetapi juga sebagai instrumen yang mempererat hubungan antarkerajaan.

Perubahan berikutnya terlihat pada orientasi pemerintahan Kedatuan Suppa setelah Islam diterima sebagai agama resmi kerajaan. Sebelum Islamisasi, legitimasi kekuasaan lebih banyak didasarkan pada sistem adat dan garis keturunan bangsawan. Setelah Islam diterima, konsep kepemimpinan mulai mengalami perubahan dengan menempatkan nilai-nilai keislaman sebagai salah satu dasar legitimasi politik. Seorang penguasa tidak hanya dituntut menjaga adat, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Meskipun demikian, perubahan orientasi pemerintahan tidak berlangsung secara revolusioner. Sistem pangadereng tetap dipertahankan sebagai dasar kehidupan masyarakat Bugis, tetapi secara bertahap disesuaikan dengan ajaran Islam melalui penambahan unsur sara' (syariat)⁵⁰. Proses ini menunjukkan bahwa Islamisasi di Kedatuan Suppa berlangsung melalui mekanisme akulturasi, yaitu perpaduan antara tradisi lokal dengan nilai-nilai Islam tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan proses Islamisasi di Suppa berbeda dengan wilayah lain yang mengalami perubahan politik melalui penaklukan militer.

⁴⁹Leonard Y. Andaya, *The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi in the Seventeenth Century* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1981), hlm. 42–55.

⁵⁰J. P. Roszi dan M. Mutia, "Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Keagamaan," *FOKUS* 3, no. 2 (2018): 171–180.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa proses penerimaan Islam oleh elite Kedatuan Suppa merupakan hasil interaksi antara faktor politik, perdagangan, dan dakwah yang berlangsung secara bertahap. Peran We Passulle Daeng Bulaeng sebagai penguasa, dukungan kalangan bangsawan, serta diterimanya Islam sebagai agama kerajaan menjadi faktor utama yang mempercepat transformasi politik di Kedatuan Suppa. Proses tersebut tidak menghilangkan sistem adat yang telah berkembang sebelumnya, melainkan melahirkan bentuk pemerintahan baru yang memadukan nilai-nilai Islam dengan tradisi politik Bugis. Kondisi inilah yang kemudian menjadi dasar bagi perubahan struktur pemerintahan dan dinamika politik Kedatuan Suppa pada abad XVII.

D. Integrasi Islam dalam Kehidupan Politik dan Sosial

Masuknya Islam ke Kedatuan Suppa tidak hanya membawa perubahan dalam aspek keagamaan, tetapi juga memengaruhi sistem politik dan kehidupan sosial masyarakat. Setelah Islam diterima sebagai agama kerajaan, nilai-nilai Islam mulai diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan yang sebelumnya berlandaskan adat Bugis. Proses integrasi ini berlangsung secara bertahap melalui penyesuaian antara norma-norma Islam dengan sistem *pangadereng* yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Berbeda dengan proses islamisasi yang berlangsung melalui penaklukan di beberapa wilayah lain, integrasi Islam di Kedatuan Suppa lebih menekankan pendekatan akomodatif sehingga tidak menghilangkan identitas budaya lokal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Islam diterima sebagai unsur yang melengkapi sistem politik dan sosial yang telah berkembang sebelumnya, bukan sebagai pengganti adat secara keseluruhan.

Salah satu bentuk nyata integrasi Islam dalam pemerintahan Kedatuan Suppa adalah pembentukan Parewa Syara', yaitu lembaga keagamaan yang bertugas mengelola urusan syariat Islam di lingkungan kerajaan⁵¹. Kehadiran Parewa Syara' menjadi penanda bahwa Islam telah memperoleh posisi resmi dalam struktur

⁵¹Ahmad Yani, Ahmad Zulfikar, Susi Mako, dan Mirnanini, "Penerimaan dan Perkembangan Islam di Kerajaan Suppa Abad ke-17" (2024), hlm. 42–46.

pemerintahan. Lembaga ini memiliki tanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan ibadah, memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat, serta membantu penguasa dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan hukum Islam. Pembentukan Parewa Syara' juga menunjukkan bahwa pemerintahan Kedatuan Suppa mulai mengakomodasi unsur keagamaan ke dalam birokrasi tanpa menghilangkan peran lembaga adat yang telah ada sebelumnya.

Keberadaan Parewa Syara' memperlihatkan adanya pembagian fungsi yang lebih jelas antara urusan pemerintahan dan urusan keagamaan. Sebelum Islamisasi, seluruh persoalan sosial dan politik diselesaikan melalui ketentuan adat yang dijalankan oleh para pemangku adat dan bangsawan. Setelah Islam diterima, sebagian persoalan yang berkaitan dengan perkawinan, warisan, wakaf, serta pelaksanaan ibadah mulai berada di bawah kewenangan lembaga syariat⁵². Pembagian tugas tersebut tidak menimbulkan pertentangan dengan sistem adat, melainkan memperkuat efektivitas pemerintahan karena setiap lembaga memiliki fungsi yang saling melengkapi. Dengan demikian, Parewa Syara' menjadi salah satu institusi penting dalam proses transformasi politik Kedatuan Suppa pascaislamisasi.

Dalam struktur Parewa Syara', jabatan Qadhi menempati posisi yang sangat penting sebagai pejabat kerajaan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hukum Islam⁵³. Qadhi merupakan ulama yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai syariat dan diberi kewenangan untuk memberikan pertimbangan keagamaan kepada penguasa. Selain bertugas memimpin peradilan agama, Qadhi juga berperan dalam memberikan nasihat kepada Datu mengenai kebijakan yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa sejak Islam diterima sebagai agama kerajaan, unsur keagamaan mulai menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan politik di lingkungan istana.

⁵²Muh. Ilham Majid, Abd. Rahim Yunus, dan Wahyuddin, "Perkembangan Islam di Kedatuan Suppa Abad ke-17" (2023), hlm. 61–68.

⁵³ Iman, R. Q., & Joni, S. H. I. (2024). *KEKUASAAN YUDIKATIF DALAM ISLAM Qadha, Tahkim, Mazhalim dan Hisbah*. wawasan Ilmu.

Peran Qadhi tidak terbatas pada pelaksanaan tugas-tugas keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung antara penguasa dengan masyarakat dalam persoalan hukum Islam. Melalui kedudukannya, Qadhi berupaya memastikan bahwa penerapan syariat tidak bertentangan dengan kondisi sosial masyarakat Bugis. Oleh karena itu, setiap keputusan yang berkaitan dengan hukum Islam senantiasa mempertimbangkan adat istiadat yang telah berkembang sebelumnya. Pola tersebut mencerminkan adanya hubungan yang harmonis antara otoritas politik dan otoritas keagamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kedatuan Suppa.

Integrasi Islam juga terlihat dari mulai diterapkannya hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penerapan tersebut terutama menyangkut persoalan perkawinan, perceraian, warisan, zakat, dan berbagai bentuk ibadah yang sebelumnya belum diatur secara khusus dalam sistem adat⁵⁴. Namun demikian, hukum Islam tidak diberlakukan secara menyeluruh terhadap seluruh aspek pemerintahan, melainkan diterapkan secara selektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan lembaga kerajaan dalam mengelolanya. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Islamisasi di Kedatuan Suppa berlangsung melalui proses adaptasi, bukan perubahan yang bersifat revolusioner.

Dalam praktiknya, penerapan hukum Islam tetap berjalan berdampingan dengan ketentuan adat Bugis. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan struktur pemerintahan, hubungan antarkelompok sosial, maupun tata kehidupan masyarakat masih diselesaikan berdasarkan ketentuan pangadereng. Sebaliknya, urusan yang berkaitan dengan ibadah dan hukum keluarga lebih banyak diselesaikan berdasarkan syariat Islam. Pembagian tersebut menciptakan keseimbangan antara tradisi lokal dengan ajaran agama sehingga masyarakat tidak mengalami benturan budaya yang tajam dalam menerima perubahan tersebut.

⁵⁴Rahmani, I., & Sayuti, H. (2025). Integrasi Nilai Islam Dan Budaya Lokal Terhadap Hak Asuh Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 237-250.

Hubungan antara adat dan syariat kemudian berkembang menjadi salah satu karakteristik utama sistem politik masyarakat Bugis setelah Islamisasi. Dalam perkembangan selanjutnya, unsur sara' (syariat) dimasukkan ke dalam sistem pangadereng sehingga melengkapi unsur ade', bicara, rapang, dan wari' yang telah ada sebelumnya⁵⁵. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Bugis tidak memandang adat dan Islam sebagai dua sistem yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua unsur yang saling memperkuat dalam menciptakan ketertiban sosial dan pemerintahan. Kondisi inilah yang menjadi ciri khas proses Islamisasi di Sulawesi Selatan, termasuk di Kedatuan Suppa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa integrasi Islam dalam kehidupan politik dan sosial Kedatuan Suppa berlangsung melalui proses penyesuaian yang bertahap antara sistem adat dengan nilai-nilai syariat. Pembentukan Parewa Syara', kedudukan Qadhi, penerapan hukum Islam, serta harmonisasi antara adat dan syariat menunjukkan bahwa Islam tidak menghapus sistem politik tradisional Bugis, tetapi memberikan dimensi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transformasi tersebut memperkuat legitimasi politik kerajaan sekaligus membentuk sistem pemerintahan yang lebih adaptif terhadap perkembangan sosial dan keagamaan masyarakat pada abad XVII.

⁵⁵Rifai, A., Iskandar, I., & Wahab, A. (2025). Hukum Mandre Ade'dalam Suku Bugis Perspektif Hukum Islam (Desa Kalobba Kab. Sinjai): Mandre Ade'Law in the Bugis Tribe from Islamic Legal Perspective (Kalobba Village, Sinjai Regency). *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 4(5), 619-644.

BAB III

DINAMIKA POLITIK KEDATUAN SUPPA PASCA ISLAMISASI

A. Perubahan Legitimasi Kekuasaan Kedatuan Suppa

Sebelum Islam diterima sebagai agama kerajaan, legitimasi kekuasaan di Kedatuan Suppa dibangun berdasarkan sistem adat yang berkembang dalam masyarakat Bugis. Kekuasaan seorang Datu dipandang sah apabila berasal dari garis keturunan bangsawan yang memiliki hubungan genealogis dengan pendiri kerajaan. Dalam sistem politik Bugis, keturunan menjadi faktor utama dalam menentukan hak seseorang untuk menduduki jabatan pemerintahan⁵⁶. Namun demikian, legitimasi tersebut tidak hanya bergantung pada asal-usul keluarga, melainkan juga pada kemampuan penguasa dalam menjalankan adat (pangadereng), menjaga keamanan wilayah, serta menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat Bugis memandang kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai adat dan kepentingan bersama, bukan semata-mata sebagai hak istimewa yang diwariskan secara turun-temurun.

Sistem legitimasi pra-Islam di Kedatuan Suppa memperlihatkan bahwa adat menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seorang Datu memperoleh penghormatan karena dianggap sebagai pemegang amanah leluhur yang bertugas menjaga keseimbangan hubungan antara masyarakat, alam, dan kekuasaan. Dalam praktiknya, legitimasi tersebut diperkuat melalui pelaksanaan berbagai upacara adat, pengakuan dari kalangan bangsawan, serta dukungan para pemangku adat yang memiliki otoritas dalam struktur pemerintahan. Dengan demikian, keberhasilan seorang penguasa tidak hanya diukur melalui kekuatan politik dan militer, tetapi juga dari kemampuannya mempertahankan tatanan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

⁵⁶Agustina, S., Iqbal, M., & Ismail, I. (2024). Antropologi Suku Bugis. *DAWUH: Islamic Communication Journal*, 5(2), 71-86.

Salah satu konsep yang menjadi dasar legitimasi politik masyarakat Bugis adalah konsep To Manurung. Dalam tradisi Bugis, To Manurung dipahami sebagai sosok yang dipercaya turun dari dunia atas (*boting langi*) untuk membawa keteraturan dan membentuk sistem pemerintahan pertama di suatu wilayah. Meskipun kisah To Manurung memiliki variasi pada setiap kerajaan, konsep tersebut mempunyai fungsi politik yang sama, yaitu memberikan dasar legitimasi terhadap kekuasaan raja. Melalui konsep ini, seorang penguasa dipandang memiliki kedudukan yang istimewa karena diyakini berasal dari garis keturunan yang memiliki hubungan dengan kekuatan sakral. Oleh sebab itu, masyarakat memberikan penghormatan yang tinggi kepada raja sebagai pemimpin yang memperoleh mandat tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga dari tatanan kosmologis yang diyakini bersama.

Dalam perspektif politik tradisional Bugis, konsep To Manurung bukan sekadar mitos asal-usul kerajaan, melainkan merupakan instrumen legitimasi yang berfungsi menjaga stabilitas pemerintahan. Kepercayaan terhadap asal-usul sakral seorang penguasa menciptakan loyalitas masyarakat terhadap kerajaan sekaligus memperkuat kedudukan elite bangsawan dalam struktur sosial. Akan tetapi, legitimasi tersebut tetap memiliki batasan karena seorang Datu diwajibkan menjalankan pemerintahan sesuai dengan nilai lempu' (kejujuran), getteng (keteguhan), acca (kecerdasan), dan warani (keberanian).⁵⁷ Apabila seorang penguasa dianggap menyimpang dari nilai-nilai tersebut, maka dukungan politik dari bangsawan maupun masyarakat dapat berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi politik Bugis merupakan perpaduan antara legitimasi genealogis dan legitimasi moral.

Masuknya Islam pada abad XVII membawa perubahan terhadap sumber legitimasi kekuasaan di Kedatuan Suppa. Setelah Islam diterima sebagai agama kerajaan, dasar legitimasi politik tidak lagi semata-mata bertumpu pada garis keturunan maupun konsep To Manurung, tetapi juga mulai dikaitkan dengan ajaran

⁵⁷ Yunus, Y., & Mukhoyyaroh, M. (2021). Kedatuan Luwu: Nilai-Nilai To Accana Luwu. *Muqoddima: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, 2(1), 47-62.

Islam. Seorang Datu dipandang sebagai pemimpin yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat, menjaga kehidupan beragama masyarakat, serta menegakkan nilai-nilai keadilan sebagaimana diajarkan dalam Islam. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan dimensi baru terhadap konsep kepemimpinan tanpa menghapus sepenuhnya sistem legitimasi adat yang telah berkembang sebelumnya.

Legitimasi setelah Islamisasi memperlihatkan adanya proses integrasi antara adat Bugis dengan syariat Islam. Dalam praktik pemerintahan, penguasa tetap mempertahankan simbol-simbol kebangsawanan dan tradisi kerajaan, tetapi pada saat yang sama memperoleh legitimasi tambahan sebagai pelindung agama. Kondisi ini menyebabkan kedudukan seorang Datu menjadi lebih kuat karena memperoleh pengakuan dari dua sumber legitimasi sekaligus, yaitu adat dan agama. Menurut Leonard Y. Andaya, proses Islamisasi di Sulawesi Selatan lebih banyak memperkuat struktur politik lokal daripada menggantikannya, karena Islam diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan yang telah ada sebelumnya.

Perubahan legitimasi tersebut kemudian melahirkan konsep baru mengenai kedudukan seorang penguasa sebagai pelindung agama (*protector of religion*). Dalam konsep ini, seorang raja tidak hanya bertanggung jawab menjaga stabilitas politik dan keamanan kerajaan, tetapi juga berkewajiban mendukung pelaksanaan syariat Islam, membangun sarana ibadah, mengangkat pejabat keagamaan seperti Qadhi, serta memfasilitasi kegiatan dakwah. Perubahan orientasi tersebut memperlihatkan bahwa Islam mulai menjadi bagian dari tanggung jawab politik seorang penguasa⁵⁸. Dengan demikian, kewibawaan seorang Datu tidak lagi hanya diukur dari kemampuan memimpin kerajaan, tetapi juga dari komitmennya terhadap pengembangan kehidupan keagamaan masyarakat.

⁵⁸Andhika, MR, Hamdi, S., Jailani, J., Suroto, S., Ajidan, A., & Syahputra, R. (2024). Ulama, Madrasah Dan Legitimasi Kekuasaan: Dinamika Otoritas Keilmuan Dalam Sejarah Islam. *Moderasi: Jurnal Kerukunan Umat Beragama* , 1 (2), 63-78.

Konsep penguasa sebagai pelindung agama turut memengaruhi hubungan antara elite politik dan elite keagamaan di Kedatuan Suppa. Apabila sebelum Islam para pemangku adat menjadi kelompok yang paling berpengaruh dalam memberikan legitimasi kepada raja, maka setelah Islam diterima peran ulama dan pejabat syariat mulai memperoleh posisi yang penting dalam pemerintahan. Kehadiran Qadhi dan Parewa Syara' menjadi bukti bahwa legitimasi politik mulai melibatkan unsur keagamaan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian, hubungan tersebut tidak menghilangkan fungsi lembaga adat, melainkan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih seimbang melalui kerja sama antara otoritas adat dan otoritas agama.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perubahan legitimasi kekuasaan di Kedatuan Suppa merupakan salah satu dampak paling penting dari proses Islamisasi pada abad XVII. Sebelum Islam, legitimasi politik bertumpu pada adat, garis keturunan, dan konsep To Manurung sebagai dasar kewibawaan penguasa. Setelah Islam diterima sebagai agama kerajaan, sumber legitimasi berkembang dengan memasukkan nilai-nilai syariat sehingga penguasa tidak hanya dipandang sebagai pemimpin adat, tetapi juga sebagai pelindung agama. Transformasi tersebut tidak menghapus sistem politik tradisional Bugis, melainkan memperkuatnya melalui proses akulturasi antara adat dan Islam. Oleh karena itu, perubahan legitimasi kekuasaan di Kedatuan Suppa menunjukkan bahwa Islamisasi lebih merupakan proses adaptasi politik daripada perubahan revolusioner terhadap struktur pemerintahan yang telah ada.

B. Transformasi Struktur Pemerintahan

Transformasi struktur pemerintahan di Kedatuan Suppa merupakan salah satu konsekuensi penting dari proses islamisasi yang berlangsung pada abad XVII. Sebelum Islam diterima sebagai agama kerajaan, sistem pemerintahan Kedatuan Suppa sepenuhnya berlandaskan pada sistem politik tradisional Bugis yang diatur

melalui pangadereng sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan kekuasaan⁵⁹. Struktur pemerintahan dipimpin oleh seorang Datu yang dibantu oleh para bangsawan, pemangku adat, dan pejabat kerajaan dalam menjalankan administrasi pemerintahan serta menjaga stabilitas politik. Dalam sistem tersebut, kewenangan penguasa tidak bersifat absolut karena setiap kebijakan harus mempertimbangkan ketentuan adat yang berlaku. Oleh sebab itu, struktur pemerintahan sebelum Islam lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara kewibawaan penguasa dengan otoritas lembaga adat yang telah berkembang dalam masyarakat Bugis.

Pada masa pra-Islam, penyelenggaraan pemerintahan di Kedatuan Suppa berorientasi pada pelaksanaan norma-norma adat yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Unsur-unsur ade', bicara, rapang, dan wari' menjadi dasar dalam mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat, penyelesaian sengketa, pembagian status sosial, serta pelaksanaan pemerintahan. Seluruh urusan politik, hukum, dan kemasyarakatan berada dalam kewenangan lembaga adat tanpa adanya institusi keagamaan yang memiliki fungsi administratif dalam pemerintahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem politik Kedatuan Suppa sebelum Islamisasi telah memiliki organisasi pemerintahan yang mapan, meskipun belum mengenal pembagian kewenangan antara urusan pemerintahan dan urusan keagamaan.

Setelah Islam diterima sebagai agama kerajaan, struktur pemerintahan mulai mengalami perubahan melalui pembentukan Parewa Syara' sebagai lembaga resmi yang menangani urusan keagamaan. Kehadiran lembaga ini menjadi salah satu bentuk adaptasi politik terhadap perkembangan Islam tanpa menghapus struktur pemerintahan tradisional yang telah ada sebelumnya. Parewa Syara' berfungsi mengelola berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam, seperti pembinaan kehidupan keagamaan, penyelenggaraan ibadah, pendidikan agama, serta pemberian pertimbangan kepada penguasa mengenai kebijakan yang

⁵⁹Azis, A., Ummisa, N., & Ardiansyah, M. (2025). Integrasi Islam Dalam Struktur Pemerintahan Dan Kehidupan Sosial Kedatuan Suppa Di Ajatappareng Abad 17 Masehi. *Batuthah: Jurnal Sejarah Padaban Islam*, 4(2), 219-233.

berkaitan dengan hukum Islam⁶⁰. Dengan demikian, pembentukan Parewa Syara' menandai dimulainya integrasi antara sistem pemerintahan adat dengan lembaga keagamaan dalam struktur politik Kedatuan Suppa.

Masuknya agama Islam ke Kedatuan Suppa pada abad ke-17 tidak diiringi dengan transisi pemerintahan dari kedatuan menjadi kesultanan seperti yang terlihat di banyak kerajaan lain di Nusantara. Hal ini terjadi karena proses islamisasi di Sulawesi Selatan berjalan melalui akomodasi dan integrasi dengan sistem politik setempat, alih-alih menggantikan struktur politik yang sudah ada. Sebelum keberadaan Islam, Kedatuan Suppa memiliki sistem pemerintahan yang solid, di mana Datu merupakan penguasa tertinggi dengan legitimasi yang diberikan berdasarkan adat (pangadereng), garis keturunan, dan gagasan To Manurung. Setelah Islam diterima sebagai agama resmi, elemen legitimasi keagamaan ditambahkan ke dalam sistem yang ada tanpa menghilangkan dasar legitimasi adat yang sudah ada. Dengan cara ini, Islam menjadi elemen yang memperkuat otoritas penguasa, sementara struktur pemerintahan serta gelar Datu masih dipertahankan sebagai simbol identitas politik masyarakat Bugis. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses islamisasi di Suppa lebih berfokus pada kelanjutan politik daripada perubahan dalam bentuk pemerintahan

Keberlangsungan sistem kedatuan dipengaruhi oleh besarnya pengaruh tradisi politik Bugis dalam Konfederasi Ajatappareng yang menekankan pentingnya stabilitas pemerintahan melalui pelestarian lembaga adat. Integrasi Islam terwujud dalam bentuk pembentukan lembaga Parewa Syara', penunjukan Qadhi, serta penerapan hukum Islam di sektor tertentu seperti perkawinan, warisan, dan aktivitas keagamaan, sambil tetap menjalankan urusan pemerintahan dan adat berdasarkan pangadereng. Berbeda dengan Kerajaan Gowa dan Tallo, yang penguasanya kemudian memilih gelar Sultan sebagai simbol legitimasi politik Islam, tidak ada catatan dalam naskah lontaraq atau sumber-sumber kolonial yang menunjukkan

⁶⁰As' ad, M. (1994). Eksistensi Institusi Syara'dan Peranannya dalam Kehidupan Beragama Masyarakat di Kabupaten Soppeng. *Al-Qalam*, 6(1), 39-51.

bahwa pemimpin Suppa secara resmi mengganti gelarnya menjadi sultan atau merubah nama negaranya menjadi kesultanan. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan Islam di Kedatuan Suppa berlangsung melalui proses akulturasi, yang berarti menggabungkan nilai-nilai Islam dengan tradisi politik Bugis tanpa menghilangkan identitas lokal yang telah ada sebelumnya.

Masuknya Parewa Syara' tidak menggantikan fungsi lembaga adat, tetapi justru memperkuat sistem pemerintahan melalui pembagian tugas yang lebih jelas. Urusan yang berkaitan dengan adat istiadat tetap menjadi kewenangan para pemangku adat, sedangkan persoalan yang menyangkut syariat Islam mulai ditangani oleh pejabat-pejabat keagamaan. Model pemerintahan seperti ini memperlihatkan bahwa islamisasi di Kedatuan Suppa berlangsung melalui proses akomodasi, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem politik yang telah berkembang sebelumnya. Pendekatan tersebut memungkinkan perubahan politik berlangsung secara damai tanpa menimbulkan konflik antara kelompok adat dengan kelompok agama.

Salah satu unsur terpenting dalam Parewa Syara' adalah kedudukan Qadhi sebagai pejabat kerajaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan hukum Islam. Qadhi memiliki fungsi sebagai hakim agama yang menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, warisan, wakaf, dan persoalan keagamaan lainnya⁶¹. Selain menjalankan fungsi peradilan, Qadhi juga berperan sebagai penasihat penguasa dalam bidang keagamaan sehingga berbagai kebijakan kerajaan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa Islam mulai menjadi bagian integral dalam proses pengambilan keputusan politik di lingkungan istana.

Keberadaan Qadhi juga memperlihatkan adanya perubahan dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Sebelum Islamisasi, penyelesaian perkara sepenuhnya berada di bawah kewenangan lembaga adat berdasarkan ketentuan

⁶¹Ghoni, A. (2023). Penyelesaian Perkara Li'an di Lingkungan Peradilan Agama Perspektif Hukum Islam. *Indo Green Journal*, 1(4), 216-223.

pangadereng. Setelah Islam berkembang, sebagian perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga dan ibadah diselesaikan berdasarkan ketentuan syariat melalui lembaga Qadhi⁶². Namun demikian, perubahan tersebut tidak menghilangkan fungsi lembaga adat karena perkara-perkara sosial, politik, dan pemerintahan tetap diselesaikan menurut ketentuan adat. Kondisi ini mencerminkan adanya pembagian kewenangan yang proporsional antara lembaga adat dan lembaga syariat dalam sistem pemerintahan Kedatuan Suppa.

Hubungan antara adat dan syariat menjadi salah satu ciri utama transformasi pemerintahan di Kedatuan Suppa pascailamisasi. Dalam perkembangan selanjutnya, unsur sara' (syariat) dimasukkan ke dalam sistem pangadereng, sehingga struktur pemerintahan tidak hanya berlandaskan pada adat, tetapi juga pada nilai-nilai Islam⁶³. Integrasi tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Bugis tidak memandang Islam sebagai ancaman terhadap tradisi lokal, melainkan sebagai pelengkap yang memperkuat sistem sosial dan politik. Oleh sebab itu, perubahan struktur pemerintahan berlangsung melalui proses akulturasi yang menghasilkan bentuk pemerintahan baru tanpa menghilangkan identitas budaya Bugis.

Transformasi tersebut turut memengaruhi pembagian kewenangan dalam pemerintahan kerajaan. Penguasa tetap menjalankan fungsi sebagai pemimpin tertinggi kerajaan yang bertanggung jawab atas urusan politik, keamanan, dan hubungan diplomatik, sedangkan Parewa Syara' menangani persoalan keagamaan melalui koordinasi dengan Qadhi dan pejabat syariat lainnya. Sementara itu, para pemangku adat tetap mempertahankan kewenangannya dalam menjaga pelaksanaan pangadereng sebagai dasar kehidupan masyarakat. Pembagian kewenangan tersebut menciptakan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur karena setiap lembaga memiliki fungsi yang saling melengkapi tanpa terjadi tumpang tindih kewenangan.

⁶² Darna, A. (2021). Perkembangan hukum Islam di Indonesia: Konsep fiqh sosial dan implementasinya dalam hukum keluarga. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 90-107.

⁶³ Azis, A., Ummisa, N., & Ardiansyah, M. (2025). Integrasi Islam Dalam Struktur Pemerintahan Dan Kehidupan Sosial Kedatuan Suppa Di Ajatappareng Abad 17 Masehi. *Batuthah: Jurnal Sejarah Padaban Islam*, 4(2), 219-233.

Berdasarkan uraian tersebut, transformasi struktur pemerintahan di Kedatuan Suppa menunjukkan bahwa islamisasi membawa perubahan kelembagaan yang signifikan tanpa menghapus fondasi politik tradisional Bugis. Pembentukan Parewa Syara', penguatan kedudukan Qadhi, integrasi adat dengan syariat, serta pembagian kewenangan antara lembaga adat dan lembaga keagamaan menjadi bukti bahwa Islam diterima melalui proses adaptasi politik yang bertahap. Transformasi tersebut tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintahan, tetapi juga menciptakan sistem birokrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang telah memeluk Islam. Dengan demikian, perubahan struktur pemerintahan di Kedatuan Suppa merupakan hasil perpaduan antara nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip Islam yang membentuk karakter politik kerajaan pada abad XVII.

C. Relasi Politik Politik Kedatuan Suppa dengan Kerajaan Lain

Hubungan politik Kedatuan Suppa dengan kerajaan-kerajaan lain mengalami perkembangan yang cukup signifikan setelah proses islamisasi pada abad XVII. Sebagai salah satu kerajaan yang tergabung dalam kawasan Ajatappareng, Suppa memiliki posisi strategis dalam membangun hubungan politik, ekonomi, dan keamanan dengan kerajaan-kerajaan tetangganya⁶⁴. Sebelum Islam diterima sebagai agama kerajaan, hubungan tersebut lebih banyak didasarkan pada kepentingan perdagangan, pertahanan wilayah, serta ikatan kekerabatan antarkeluarga bangsawan. Setelah Islamisasi, hubungan politik tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh kesamaan identitas keagamaan yang memperkuat kerja sama antarkerajaan. Oleh karena itu, Islam menjadi salah satu faktor yang memperluas orientasi politik Kedatuan Suppa dalam jaringan kekuasaan di Sulawesi Selatan.

Salah satu hubungan politik yang paling berpengaruh terhadap perkembangan Kedatuan Suppa adalah hubungannya dengan Kerajaan Gowa. Sebelum menjadi kerajaan Islam, Gowa telah berkembang sebagai kekuatan politik dan ekonomi yang

⁶⁴ Majid, M. I., & Yunus, A. R. (2023). Perkembangan Islam Di Kedatuan Suppa Abad Ke-17. *CARITA: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 2(1), 1-17.

menguasai jalur perdagangan di kawasan timur Nusantara. Ketika Gowa menerima Islam pada masa pemerintahan Sultan Alauddin pada tahun 1605, kerajaan tersebut mulai menjalankan kebijakan penyebaran Islam kepada kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan. Kedekatan hubungan antara Suppa dan Gowa menyebabkan proses penyebaran Islam berlangsung lebih cepat karena didukung oleh hubungan diplomatik yang telah terjalin sebelumnya. Dalam konteks ini, hubungan politik dengan Gowa tidak hanya memperkuat posisi Islam di Kedatuan Suppa, tetapi juga membuka peluang kerja sama dalam bidang perdagangan dan keamanan kawasan.

Hubungan antara Kedatuan Suppa dan Gowa setelah Islamisasi menunjukkan adanya perubahan orientasi diplomasi kerajaan. Jika sebelumnya hubungan lebih banyak didasarkan pada kepentingan ekonomi, maka setelah kedua kerajaan memeluk Islam hubungan tersebut berkembang menjadi kerja sama yang dilandasi oleh kepentingan politik dan keagamaan. Kesamaan agama memberikan dasar yang lebih kuat dalam membangun aliansi antarkerajaan, termasuk dalam menjaga stabilitas jalur perdagangan dan menghadapi ancaman dari kerajaan-kerajaan yang belum menerima Islam maupun kekuatan asing yang mulai memasuki wilayah Nusantara. Dengan demikian, hubungan antara Suppa dan Gowa mencerminkan bagaimana Islam menjadi salah satu unsur yang memperkuat solidaritas politik di Sulawesi Selatan pada abad XVII.

Selain menjalin hubungan dengan Gowa, Kedatuan Suppa tetap mempertahankan hubungan yang erat dengan kerajaan-kerajaan dalam Konfederasi Ajatappareng, yaitu Sidenreng, Rappang, Sawitto, dan Alitta. Konfederasi tersebut dibentuk atas dasar kepentingan bersama dalam bidang politik, ekonomi, dan pertahanan sehingga setiap kerajaan tetap memiliki kedaulatan masing-masing, tetapi saling bekerja sama dalam menghadapi berbagai persoalan regional⁶⁵. Setelah Islam diterima oleh sebagian besar anggota konfederasi, hubungan tersebut semakin

⁶⁵ Amir, M. (2015). Persekutuan lima Ajatappareng di Sulawesi Selatan abad ke-16. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 1(2), 317157.

diperkuat oleh adanya kesamaan nilai keagamaan yang mempermudah koordinasi antarpenguasa dalam mengambil kebijakan bersama.

Hubungan politik dalam Konfederasi Ajatappareng setelah Islamisasi juga menunjukkan adanya perubahan dalam pola kerja sama antarkerajaan. Nilai-nilai Islam mulai memengaruhi proses musyawarah, penyelesaian konflik, serta pembentukan kesepakatan politik di antara para penguasa. Meskipun demikian, prinsip-prinsip adat Bugis tetap dipertahankan sebagai dasar dalam menjaga keseimbangan hubungan antarkerajaan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menghapus sistem politik yang telah berkembang dalam Ajatappareng, tetapi memberikan dimensi baru terhadap praktik diplomasi dan kerja sama regional.

Islamisasi turut membawa perubahan terhadap hubungan diplomatik Kedatuan Suppa dengan kerajaan-kerajaan lain di luar Ajatappareng. Identitas sebagai kerajaan Islam mempermudah Suppa menjalin komunikasi dengan kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi Selatan maupun di kawasan Nusantara. Hubungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pertukaran utusan kerajaan, tetapi juga melalui kerja sama perdagangan, pendidikan keagamaan, dan penyebaran ulama. Dalam perspektif politik, diplomasi yang dibangun setelah Islamisasi memperlihatkan bahwa agama menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas jaringan hubungan antarkerajaan.

Perubahan hubungan diplomatik tersebut memberikan keuntungan strategis bagi Kedatuan Suppa. Sebagai kerajaan pesisir, Suppa memperoleh akses yang lebih luas terhadap jaringan perdagangan maritim yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan wilayah Maluku, Kalimantan, Jawa, hingga Semenanjung Melayu⁶⁶. Hubungan diplomatik yang baik juga berperan dalam menjaga stabilitas keamanan jalur pelayaran sehingga aktivitas perdagangan dapat berlangsung secara lebih aman. Oleh karena itu, hubungan politik pascaislamisasi tidak hanya berdampak pada aspek

⁶⁶Salim, S. (2024). Jaringan Teluk Bone: Aktivitas Pelayaran dan Diaspora Bugis abad XVIII—XIX. *JAWI*, 7(1), 25-36.

pemerintahan, tetapi juga memperkuat posisi ekonomi kerajaan dalam jaringan perdagangan regional.

Dalam jaringan politik masyarakat Bugis, Kedatuan Suppa tetap menempati posisi yang penting meskipun harus berhadapan dengan dominasi Kerajaan Gowa sebagai kekuatan besar di Sulawesi Selatan. Posisi strategis tersebut didukung oleh letak geografis Suppa sebagai kerajaan maritim, keanggotaannya dalam Konfederasi Ajatappareng, serta kemampuannya menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan. Islamisasi semakin memperkuat kedudukan tersebut karena memberikan identitas politik baru yang memudahkan Suppa membangun hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya tanpa meninggalkan karakter politik Bugis yang berlandaskan adat dan musyawarah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa relasi politik Kedatuan Suppa setelah Islamisasi mengalami perkembangan yang cukup kompleks. Hubungan dengan Gowa, kerja sama dalam Konfederasi Ajatappareng, berkembangnya diplomasi antarkerajaan Islam, serta posisi strategis Suppa dalam jaringan politik Bugis menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengubah orientasi keagamaan kerajaan, tetapi juga memperluas ruang gerak politiknya. Transformasi tersebut memperlihatkan bahwa Islamisasi berkontribusi terhadap penguatan hubungan regional dan peningkatan peran Kedatuan Suppa dalam dinamika politik Sulawesi Selatan pada abad XVII.

D. Dinamika Politik dalam Perspektif Teori

Dinamika politik Kedatuan Suppa pascailamisasi pada abad XVII menunjukkan bahwa perubahan politik yang terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal kerajaan, tetapi juga oleh interaksi dengan perkembangan agama, perdagangan, dan hubungan antarkerajaan di Sulawesi Selatan. Proses perubahan tersebut berlangsung secara bertahap sehingga tidak menghilangkan sistem politik tradisional yang telah berkembang sebelumnya. Sebaliknya, Islam hadir sebagai unsur yang memperkuat struktur politik melalui perubahan legitimasi kekuasaan,

pembentukan lembaga keagamaan, serta perluasan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Oleh karena itu, dinamika politik Kedatuan Suppa dapat dipahami melalui beberapa pendekatan teoretis yang menjelaskan bagaimana agama mampu memengaruhi perubahan struktur sosial dan politik tanpa menimbulkan disintegrasi dalam masyarakat.

Analisis pertama menggunakan Teori Islamisasi yang menjelaskan bahwa penyebaran Islam di Nusantara berlangsung melalui proses yang damai dengan memanfaatkan jaringan perdagangan, hubungan diplomatik, perkawinan, dan aktivitas dakwah. Dalam konteks Kedatuan Suppa, teori ini menjelaskan bahwa perubahan politik tidak diawali oleh penaklukan militer, melainkan melalui interaksi yang panjang antara masyarakat lokal dengan para pedagang Muslim, ulama, dan kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi Selatan⁶⁷. Hubungan perdagangan yang telah berkembang sejak masa pra-Islam menjadi media utama bagi masuknya nilai-nilai Islam ke lingkungan istana sebelum akhirnya diterima sebagai agama kerajaan. Dengan demikian, Islamisasi di Kedatuan Suppa berlangsung sebagai proses transformasi sosial yang berkembang dari bawah hingga memperoleh legitimasi politik dari elite kerajaan.

Teori Islamisasi juga menjelaskan bahwa penerimaan Islam oleh elite kerajaan menjadi faktor yang mempercepat perubahan sistem pemerintahan. Setelah Datu dan kalangan bangsawan menerima Islam, berbagai kebijakan kerajaan mulai menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip syariat tanpa menghapus sistem adat yang telah berlaku. Pembentukan Parewa Syara', pengangkatan Qadhi, serta masuknya unsur sara' ke dalam pangadereng menunjukkan bahwa Islam diterima melalui proses adaptasi terhadap budaya lokal. Fakta tersebut memperkuat pandangan bahwa islamisasi di Kedatuan Suppa merupakan proses integrasi budaya dan politik, bukan proses penggantian sistem pemerintahan secara menyeluruh.

⁶⁷Ahmad Yani, *Islamisasi di Ajatappareng Abad XVI–XVII (Suatu Kajian Historis)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), 74–88.

Analisis berikutnya menggunakan Teori Fungsionalisme Struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Menurut Parsons, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas berbagai unsur yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk menjaga keseimbangan sosial. Setiap lembaga memiliki fungsi tertentu dalam mempertahankan stabilitas masyarakat sehingga perubahan yang terjadi pada satu unsur akan diikuti oleh penyesuaian unsur-unsur lainnya. Dalam konteks Kedatuan Suppa, masuknya Islam tidak menyebabkan runtuhnya sistem politik tradisional, tetapi justru melahirkan penyesuaian terhadap struktur pemerintahan agar tetap mampu menjalankan fungsinya secara efektif.

Pembentukan Parewa Syara', kedudukan Qadhi, serta integrasi syariat ke dalam sistem pangadereng dapat dipahami sebagai bentuk diferensiasi struktur sebagaimana dijelaskan oleh Parsons. Lembaga adat tetap menjalankan fungsi sosial dan politik, sedangkan lembaga syariat mengelola urusan keagamaan serta hukum Islam. Pembagian fungsi tersebut menciptakan keseimbangan baru dalam sistem pemerintahan Kedatuan Suppa sehingga perubahan politik dapat berlangsung tanpa menimbulkan konflik yang mengancam stabilitas kerajaan. Dengan demikian, teori Fungsionalisme Struktural mampu menjelaskan bahwa transformasi politik di Kedatuan Suppa merupakan bentuk adaptasi kelembagaan terhadap perubahan lingkungan sosial dan keagamaan.

Selain itu, konsep AGIL yang dikembangkan Parsons juga relevan dalam menjelaskan dinamika politik Kedatuan Suppa. Fungsi Adaptation (A) terlihat dari kemampuan kerajaan menyesuaikan sistem pemerintahannya dengan perkembangan Islam. Goal Attainment (G) tercermin dalam kebijakan penguasa yang menjadikan Islam sebagai salah satu dasar legitimasi politik kerajaan. Integration (I) tampak pada keberhasilan mengharmoniskan adat Bugis dengan syariat Islam melalui sistem pangadereng, sedangkan Latency (L) terlihat dari kemampuan masyarakat mempertahankan nilai-nilai budaya Bugis sambil menerima ajaran Islam sebagai

bagian dari kehidupan sosial⁶⁸. Keempat fungsi tersebut menunjukkan bahwa perubahan politik di Kedatuan Suppa berlangsung dalam kondisi yang relatif stabil.

Selanjutnya, dinamika politik Kedatuan Suppa juga dapat dianalisis melalui Teori Akulturasi. Teori ini menjelaskan bahwa ketika dua kebudayaan bertemu dalam waktu yang cukup lama, akan terjadi proses saling memengaruhi tanpa harus menghilangkan identitas budaya masing-masing. Dalam sejarah Kedatuan Suppa, proses tersebut terlihat dari diterimanya ajaran Islam tanpa menghapus tradisi politik Bugis yang telah berkembang sebelumnya. Sebaliknya, Islam dipadukan dengan sistem adat sehingga terbentuk pola pemerintahan yang memiliki karakter lokal sekaligus bercorak Islam.

Bentuk akulturasi tersebut tampak pada perubahan sistem legitimasi kekuasaan, hubungan antara adat dan syariat, serta penyelenggaraan pemerintahan. Konsep To Manurung sebagai dasar legitimasi politik tetap dipertahankan sebagai bagian dari sejarah kerajaan, sementara Islam memberikan dasar moral baru bagi kepemimpinan melalui konsep penguasa sebagai pelindung agama. Demikian pula dalam sistem hukum, unsur sara' diintegrasikan ke dalam pangadereng tanpa menghilangkan fungsi ade', bicara, rapang, dan wari'. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa islamisasi di Kedatuan Suppa merupakan proses akulturasi yang menghasilkan sistem politik baru tanpa memutus kesinambungan tradisi lokal.

Berdasarkan ketiga teori tersebut dapat dipahami bahwa dinamika politik Kedatuan Suppa pascaislamisasi merupakan hasil interaksi antara agama, budaya, dan struktur sosial yang berkembang secara bertahap. Teori Islamisasi menjelaskan proses masuknya Islam melalui perdagangan, diplomasi, dan dakwah; Teori Fungsionalisme Struktural menjelaskan kemampuan sistem politik dalam beradaptasi terhadap perubahan; sedangkan Teori Akulturasi menjelaskan proses perpaduan antara adat Bugis dan nilai-nilai Islam. Ketiga teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan bahwa perubahan politik di Kedatuan Suppa tidak berlangsung secara

⁶⁸Talcott Parsons, *The Social System* (New York: Free Press, 1951), 26–45; George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, ed. ke-8 (Jakarta: Kencana, 2014), 117–120.

revolusioner, melainkan melalui proses transformasi yang menghasilkan sistem pemerintahan baru dengan tetap mempertahankan identitas politik masyarakat Bugis. Analisis ini menunjukkan bahwa islamisasi tidak hanya mengubah aspek keagamaan, tetapi juga menjadi faktor penting dalam pembentukan dinamika politik Kedatuan Suppa pada abad XVII.



BAB IV

DAMPAK POLITIK KEDATUAN SUPPA PASCA ISLAMISASI

A. Dampak dalam Sistem Pemerintahan

Islamisasi yang berlangsung di Kedatuan Suppa pada abad XVII membawa dampak yang signifikan terhadap sistem pemerintahan kerajaan. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat pada aspek keagamaan, tetapi juga memengaruhi struktur birokrasi, mekanisme pengambilan keputusan, serta pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebelum Islam diterima sebagai agama kerajaan, sistem pemerintahan Kedatuan Suppa sepenuhnya berlandaskan pada adat Bugis yang diatur melalui sistem **pangadereng**. Setelah Islamisasi, struktur pemerintahan mengalami penyesuaian dengan memasukkan unsur-unsur syariat ke dalam sistem politik tanpa menghilangkan fungsi lembaga adat yang telah berkembang sebelumnya⁶⁹. Dengan demikian, perubahan pemerintahan di Kedatuan Suppa merupakan bentuk transformasi kelembagaan yang berlangsung secara bertahap melalui proses adaptasi antara adat dan ajaran Islam.

Salah satu dampak utama islamisasi terhadap pemerintahan adalah terjadinya perubahan dalam sistem birokrasi kerajaan. Sebelum Islam, struktur pemerintahan lebih sederhana dan berpusat pada Datu yang dibantu oleh para bangsawan serta pemangku adat dalam mengelola urusan kerajaan. Setelah Islam diterima, birokrasi kerajaan berkembang dengan memasukkan unsur keagamaan sebagai bagian dari administrasi pemerintahan. Kehadiran pejabat-pejabat syariat memberikan warna baru dalam sistem birokrasi karena urusan pemerintahan tidak lagi hanya berorientasi pada pelaksanaan adat, tetapi juga mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang bersumber dari ajaran Islam.

Perubahan birokrasi tersebut juga terlihat dari semakin jelasnya pembagian tugas dalam pemerintahan. Sebelumnya, berbagai persoalan pemerintahan, hukum, dan kehidupan sosial sebagian besar ditangani oleh lembaga adat. Setelah Islamisasi,

⁶⁹Majid, M. I., & Yunus, A. R. (2023). Perkembangan Islam Di Kedatuan Suppa Abad Ke-17. *CARITA: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 2(1), 1-17.

sebagian kewenangan yang berkaitan dengan urusan keagamaan dipisahkan dan dikelola oleh pejabat yang memiliki kompetensi di bidang syariat. Kondisi tersebut menjadikan sistem pemerintahan lebih efektif karena setiap lembaga memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan bidang tugasnya. Oleh sebab itu, perubahan birokrasi tidak hanya meningkatkan kapasitas administrasi kerajaan, tetapi juga memperkuat koordinasi antara lembaga adat dan lembaga keagamaan.

Dampak berikutnya adalah terbentuknya Parewa Syara' sebagai lembaga resmi yang menangani berbagai urusan keagamaan di lingkungan kerajaan. Kehadiran Parewa Syara' menandai bahwa Islam telah memperoleh kedudukan formal dalam struktur pemerintahan Kedatuan Suppa⁷⁰. Lembaga ini bertugas mengawasi pelaksanaan syariat Islam, membina kehidupan keagamaan masyarakat, serta memberikan pertimbangan kepada penguasa dalam persoalan yang berkaitan dengan hukum Islam. Pembentukan Parewa Syara' menunjukkan bahwa pemerintahan Kedatuan Suppa tidak hanya mengalami perubahan pada aspek kelembagaan, tetapi juga mengalami perluasan fungsi pemerintahan melalui integrasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem politik kerajaan.

Keberadaan Parewa Syara' juga memperkuat hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat. Melalui lembaga tersebut, berbagai kebutuhan keagamaan masyarakat dapat diakomodasi secara lebih terorganisasi, seperti penyelenggaraan ibadah, pendidikan agama, penyelesaian persoalan keluarga, dan pembinaan moral masyarakat⁷¹. Dengan demikian, fungsi pemerintahan tidak lagi terbatas pada pengelolaan administrasi dan keamanan kerajaan, tetapi juga mencakup pembinaan kehidupan keagamaan sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap masyarakatnya. Hal tersebut memperlihatkan adanya perluasan fungsi pemerintahan setelah proses islamisasi berlangsung.

⁷⁰As'ad, M. (1994). Eksistensi Institusi Syara'dan Peranannya dalam Kehidupan Beragama Masyarakat di Kabupaten Soppeng. *Al-Qalam*, 6(1), 39-51.

⁷¹Christian Pelras, *The Bugis*, hlm. 213-216.

Perubahan lain yang sangat penting adalah semakin jelasnya pembagian fungsi pemerintahan antara lembaga adat dan lembaga syariat. Urusan pemerintahan, hubungan diplomatik, keamanan, serta pengelolaan wilayah tetap berada di bawah kewenangan Datu beserta para bangsawan. Sebaliknya, persoalan yang berkaitan dengan hukum keluarga, ibadah, wakaf, zakat, dan penyelesaian perkara keagamaan mulai ditangani oleh lembaga syariat melalui Qadhi dan Parewa Syara'⁷². Pembagian kewenangan tersebut menciptakan sistem pemerintahan yang lebih teratur karena setiap lembaga memiliki ruang kerja yang berbeda namun tetap saling mendukung dalam menjaga stabilitas kerajaan.

Hubungan antara lembaga adat dan lembaga syariat dalam pemerintahan Kedatuan Suppa menunjukkan bahwa islamisasi tidak menghapus sistem politik tradisional Bugis. Sebaliknya, kedua lembaga tersebut bekerja secara berdampingan dalam menjalankan fungsi masing-masing. Sistem pangadereng tetap menjadi dasar kehidupan sosial masyarakat, sedangkan unsur sara' melengkapi sistem tersebut sebagai pedoman dalam pelaksanaan ajaran Islam. Integrasi tersebut memperlihatkan kemampuan masyarakat Bugis dalam mengakomodasi perubahan tanpa kehilangan identitas budaya yang telah berkembang sejak masa pra-Islam.

Islamisasi juga berdampak pada meningkatnya peran ulama dalam kehidupan politik kerajaan. Jika sebelumnya para pemangku adat menjadi kelompok yang paling berpengaruh dalam memberikan pertimbangan kepada penguasa, maka setelah Islam diterima para ulama mulai memperoleh kedudukan penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Melalui jabatan Qadhi dan pejabat Parewa Syara', ulama berperan sebagai penasihat kerajaan dalam bidang keagamaan, pendidikan, serta penyelesaian perkara berdasarkan syariat. Kehadiran ulama tidak hanya memperkuat pelaksanaan hukum Islam, tetapi juga meningkatkan legitimasi moral pemerintahan di mata masyarakat.

⁷² Mattulada, *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1985), 196–203.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa islamisasi membawa dampak yang besar terhadap sistem pemerintahan Kedatuan Suppa. Perubahan birokrasi, pembentukan Parewa Syara', pembagian fungsi pemerintahan, serta meningkatnya peran ulama menunjukkan bahwa transformasi politik tidak hanya berlangsung pada tingkat ideologi, tetapi juga menyentuh aspek kelembagaan pemerintahan. Meskipun mengalami berbagai perubahan, sistem politik Bugis tetap dipertahankan sebagai fondasi pemerintahan sehingga tercipta keseimbangan antara adat dan syariat. Dengan demikian, dampak islamisasi terhadap sistem pemerintahan Kedatuan Suppa mencerminkan proses transformasi politik yang bersifat evolutif dan adaptif sesuai dengan dinamika masyarakat Bugis pada abad XVII.

B. Dampak terhadap Legitimasi dan Kekuasaan Raja

Islamisasi di Kedatuan Suppa membawa perubahan yang mendasar terhadap konsep legitimasi dan pelaksanaan kekuasaan raja. Sebelum Islam diterima sebagai agama kerajaan, legitimasi seorang Datu bertumpu pada sistem adat, garis keturunan bangsawan, dan kepercayaan terhadap konsep To Manurung sebagai sumber kewibawaan politik. Setelah Islamisasi, legitimasi tersebut mengalami perkembangan dengan memasukkan nilai-nilai Islam sebagai dasar moral dan spiritual dalam pemerintahan⁷³. Perubahan ini tidak menghapus legitimasi adat yang telah berkembang sebelumnya, tetapi melengkapinya dengan legitimasi religius sehingga kedudukan raja memperoleh pengakuan yang lebih luas, baik secara adat maupun keagamaan. Oleh karena itu, islamisasi menjadi salah satu faktor penting yang memperkuat fondasi politik pemerintahan Kedatuan Suppa pada abad XVII.

Penguatan legitimasi politik terlihat dari semakin kokohnya posisi raja sebagai pemimpin yang tidak hanya bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan, tetapi juga terhadap kehidupan keagamaan masyarakat. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Datu tetap menjalankan fungsi politik, seperti

⁷³ Andhika, M. R., Hamdi, S., Jailani, J., Suroto, S., Ajidan, A., & Syahputra, R. (2024). Ulama, Madrasah Dan Legitimasi Kekuasaan: Dinamika Otoritas Keilmuan Dalam Sejarah Islam. *Moderation: Journal of Religious Harmony*, 1(2), 63-78.

menjaga keamanan kerajaan, mengatur hubungan diplomatik, dan mengelola pemerintahan. Namun setelah Islam diterima sebagai agama kerajaan, tanggung jawab tersebut berkembang dengan kewajiban menjaga pelaksanaan syariat serta mendukung penyebaran ajaran Islam. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kekuasaan raja memperoleh dimensi baru yang menggabungkan otoritas politik dengan tanggung jawab keagamaan.

Penguatan legitimasi politik juga dipengaruhi oleh diterimanya Islam oleh kalangan bangsawan dan elite kerajaan. Dukungan dari kelompok elite terhadap kebijakan islamisasi memperkuat stabilitas pemerintahan karena tidak terjadi pertentangan yang berarti antara kepentingan politik dan kepentingan agama. Sebaliknya, Islam menjadi instrumen yang mempererat hubungan antara penguasa dengan masyarakat melalui nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, legitimasi politik raja tidak lagi hanya bersumber dari tradisi leluhur, tetapi juga dari kemampuannya menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Salah satu dampak penting islamisasi adalah munculnya legitimasi religius sebagai dasar baru dalam kekuasaan raja. Jika pada masa pra-Islam kewibawaan penguasa lebih banyak dikaitkan dengan asal-usul keturunan dan simbol-simbol adat, maka setelah Islamisasi seorang raja dipandang sebagai pemimpin yang memperoleh amanah untuk menjaga agama serta menegakkan nilai-nilai syariat. Legitimasi religius tersebut memperkuat posisi raja di hadapan masyarakat karena kepemimpinannya dipandang memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa agama menjadi unsur penting dalam membangun kewibawaan politik di Kedatuan Suppa.

Legitimasi religius tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan berdampingan dengan sistem adat Bugis yang telah berkembang sebelumnya. Raja tetap mempertahankan kedudukannya sebagai pemimpin adat, tetapi pada saat yang sama

juga berperan sebagai pelindung kehidupan beragama⁷⁴. Integrasi antara adat dan Islam tersebut menciptakan bentuk legitimasi yang bersifat ganda, di mana penguasa memperoleh pengakuan dari tradisi lokal sekaligus dari ajaran Islam. Kondisi ini memperlihatkan bahwa proses islamisasi tidak menggantikan sistem politik tradisional, melainkan memperkuatnya melalui penambahan nilai-nilai keagamaan dalam praktik pemerintahan.

Islamisasi juga membawa perubahan terhadap konsep kepemimpinan di Kedatuan Suppa. Sebelum Islam, seorang Datu dipandang sebagai pemimpin yang bertugas menjaga adat, melindungi rakyat, dan mempertahankan kehormatan kerajaan. Setelah Islam diterima, konsep kepemimpinan berkembang dengan menempatkan raja sebagai pemimpin yang bertanggung jawab kepada masyarakat sekaligus kepada Tuhan. Oleh karena itu, keberhasilan seorang penguasa tidak hanya diukur dari kemampuannya mempertahankan kekuasaan, tetapi juga dari kemampuannya menegakkan keadilan, menjalankan amanah, dan melindungi kepentingan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.

Perubahan konsep kepemimpinan tersebut turut memengaruhi pola hubungan antara raja dan para pejabat kerajaan. Kehadiran Qadhi dan Parewa Syara' memberikan pertimbangan keagamaan dalam proses pengambilan keputusan sehingga kebijakan kerajaan tidak hanya mempertimbangkan aspek politik, tetapi juga aspek syariat. Dengan demikian, kekuasaan raja menjadi lebih terarah karena memperoleh masukan dari lembaga adat maupun lembaga keagamaan. Kondisi tersebut menciptakan keseimbangan antara kewenangan politik dengan tanggung jawab moral dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hubungan antara raja dan masyarakat juga mengalami perubahan setelah Islamisasi. Sebelum Islam, hubungan tersebut dibangun atas dasar loyalitas kepada penguasa dan kepatuhan terhadap adat. Setelah Islam diterima, hubungan antara raja

⁷⁴Mattulada, *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1985), 187–203; Christian Pelras, *The Bugis* (Oxford: Blackwell Publishers, 1996), 213–220.

dan rakyat semakin dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan yang menekankan keadilan, persaudaraan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial. Raja tidak lagi dipandang semata-mata sebagai simbol kekuasaan, tetapi juga sebagai teladan dalam kehidupan beragama dan pelindung kepentingan masyarakat. Perubahan tersebut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan serta menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara penguasa dan rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa islamisasi membawa dampak yang besar terhadap legitimasi dan kekuasaan raja di Kedatuan Suppa. Penguatan legitimasi politik, berkembangnya legitimasi religius, perubahan konsep kepemimpinan, serta terciptanya hubungan yang lebih erat antara raja dan masyarakat menunjukkan bahwa Islam telah memberikan dimensi baru terhadap sistem kekuasaan kerajaan. Meskipun demikian, perubahan tersebut tetap berlangsung dalam kerangka adat Bugis yang menjadi fondasi pemerintahan. Oleh karena itu, transformasi legitimasi politik di Kedatuan Suppa merupakan hasil perpaduan antara tradisi lokal dan ajaran Islam yang memperkuat stabilitas pemerintahan sekaligus meningkatkan kewibawaan raja dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat.

C. Dampak terhadap Kehidupan Sosial Politik Masyarakat

Islamisasi yang berlangsung di Kedatuan Suppa pada abad XVII tidak hanya membawa perubahan terhadap struktur pemerintahan dan legitimasi kekuasaan, tetapi juga memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial politik masyarakat. Perubahan tersebut terlihat pada berkembangnya norma-norma politik yang lebih berorientasi pada nilai-nilai Islam tanpa menghilangkan identitas budaya Bugis yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Sebelum Islam diterima sebagai agama kerajaan, kehidupan sosial politik masyarakat lebih banyak diatur oleh sistem *pangadereng* yang berlandaskan adat istiadat. Setelah Islamisasi, sistem tersebut mengalami penyesuaian melalui masuknya unsur *sara'* sebagai pedoman baru dalam mengatur hubungan antara masyarakat, penguasa, dan kehidupan beragama. Dengan

demikian, islamisasi melahirkan tatanan sosial politik yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip Islam.

Salah satu dampak yang paling nyata adalah perubahan norma politik dalam kehidupan masyarakat. Sebelum Islam, norma politik masyarakat Bugis berpusat pada kepatuhan terhadap adat, penghormatan kepada bangsawan, serta pelaksanaan nilai-nilai seperti siri', lempu', getteng, dan warani sebagai dasar kehidupan bersama⁷⁵. Setelah Islam diterima, nilai-nilai tersebut tidak ditinggalkan, tetapi diperkaya dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan, amanah, musyawarah, persamaan derajat, dan tanggung jawab moral. Perubahan ini menyebabkan praktik politik tidak hanya dinilai berdasarkan ketentuan adat, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang berkembang dalam masyarakat.

Masuknya nilai-nilai Islam juga memengaruhi cara masyarakat memandang kekuasaan dan kepemimpinan. Apabila sebelumnya loyalitas kepada raja terutama didasarkan pada hubungan genealogis dan kewajiban adat, maka setelah Islamisasi muncul kesadaran bahwa kepemimpinan harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab kepada Allah Swt. Perubahan tersebut mendorong berkembangnya budaya politik yang lebih menekankan aspek etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, kehidupan sosial politik masyarakat tidak lagi hanya diikat oleh tradisi lokal, tetapi juga oleh norma-norma keagamaan yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Dampak penting lainnya terlihat pada semakin eratnya hubungan antara adat dan Islam dalam kehidupan masyarakat. Proses islamisasi di Kedatuan Suppa tidak menghilangkan adat Bugis, tetapi menghasilkan proses integrasi yang mempertemukan kedua sistem nilai tersebut. Nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam tetap dipertahankan, sedangkan kebiasaan yang dianggap tidak sesuai secara perlahan mengalami penyesuaian. Integrasi tersebut menciptakan

⁷⁵Yakub, A. (2019). *Dinamika Politik Bugis Sulawesi Selatan: Kesenambungan dan Perubahan Terhadap Politik Desentralisasi*. Ghazali Shafie Graduate School of Government, Universiti Utara Malaysia.

keseimbangan antara pelestarian budaya lokal dengan pelaksanaan syariat Islam sehingga masyarakat mampu menerima perubahan tanpa mengalami konflik sosial yang berarti.

Hubungan antara adat dan Islam juga tercermin dalam berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan. Musyawarah adat tetap menjadi mekanisme penyelesaian persoalan masyarakat, tetapi mulai dilengkapi dengan pertimbangan syariat yang disampaikan oleh para ulama atau Qadhi. Dalam berbagai upacara adat, nilai-nilai Islam semakin dominan melalui pembacaan doa, pelaksanaan ritual keagamaan, dan penguatan pendidikan moral. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menggantikan budaya lokal, melainkan menjadi bagian yang memperkaya kehidupan sosial politik masyarakat Bugis di Kedatuan Suppa.

Islamisasi turut meningkatkan peran tokoh agama dalam kehidupan masyarakat. Sebelum Islam diterima, pemangku adat merupakan kelompok yang memiliki pengaruh paling besar dalam membimbing masyarakat. Setelah Islamisasi, ulama, imam, khatib, dan Qadhi memperoleh kedudukan yang semakin penting sebagai pembimbing keagamaan sekaligus penasihat dalam berbagai persoalan sosial dan politik. Kehadiran tokoh agama memperluas proses pendidikan masyarakat mengenai ajaran Islam serta memberikan landasan moral bagi kehidupan politik kerajaan⁷⁶. Dengan demikian, tokoh agama menjadi salah satu unsur yang memperkuat integrasi sosial setelah islamisasi.

Peran tokoh agama juga terlihat dalam upaya menjaga hubungan antara masyarakat dengan pemerintah kerajaan. Para ulama tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga menjadi mediator dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Melalui pendekatan dakwah yang moderat, tokoh agama membantu menciptakan suasana kehidupan yang lebih harmonis serta

⁷⁶Yudistira, F. F., Fidlana, A., Karni, A., & Ashadi, A. (2023). PEMANGKU ADAT KOTO MAJIDIN BERPERAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MUSLIM. *Dakwatul Islam*, 8(1), 61-74.

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan kerajaan⁷⁷. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan ulama memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan politik, adat, dan agama.

Perubahan-perubahan tersebut memberikan dampak positif terhadap stabilitas politik masyarakat Kedatuan Suppa. Integrasi antara adat dan Islam menciptakan sistem nilai yang diterima secara luas oleh berbagai lapisan masyarakat sehingga potensi konflik dapat diminimalkan. Kejelasan pembagian kewenangan antara lembaga adat dan lembaga syariat, ditambah dengan meningkatnya legitimasi penguasa serta peran ulama, turut memperkuat ketertiban sosial dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Stabilitas politik yang tercipta juga mendukung perkembangan perdagangan, hubungan diplomatik, dan aktivitas sosial yang menjadi fondasi kemajuan Kedatuan Suppa sebagai salah satu kerajaan penting di kawasan Ajatappareng.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa islamisasi membawa dampak yang besar terhadap kehidupan sosial politik masyarakat Kedatuan Suppa. Perubahan norma politik, integrasi antara adat dan Islam, meningkatnya peran tokoh agama, serta terciptanya stabilitas politik menunjukkan bahwa islamisasi merupakan proses transformasi sosial yang berlangsung secara damai dan adaptif. Masyarakat Bugis mampu menerima ajaran Islam tanpa kehilangan identitas budayanya sehingga terbentuk sistem kehidupan yang menggabungkan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, dampak islamisasi terhadap kehidupan sosial politik tidak hanya memperkuat pemerintahan kerajaan, tetapi juga membentuk karakter masyarakat Kedatuan Suppa yang lebih religius, harmonis, dan stabil dalam menghadapi dinamika politik pada abad XVII.

⁷⁷ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.

D. Implikasi Transformasi Politik Kedatuan Suppa dalam Sejarah Sulawesi Selatan

Transformasi politik yang terjadi di Kedatuan Suppa pascaislamisasi pada abad XVII tidak hanya membawa perubahan terhadap sistem pemerintahan internal kerajaan, tetapi juga memberikan implikasi yang luas terhadap perkembangan sejarah politik di Sulawesi Selatan. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa islamisasi merupakan proses yang mampu membentuk tatanan politik baru melalui integrasi antara sistem adat Bugis dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai salah satu kerajaan penting di kawasan Ajatappareng, Kedatuan Suppa menjadi contoh bagaimana perubahan agama dapat mendorong pembaruan struktur politik tanpa menghilangkan identitas budaya lokal. Oleh karena itu, transformasi politik Kedatuan Suppa memiliki arti penting dalam memahami perkembangan kerajaan-kerajaan Bugis pada masa awal penyebaran Islam di Sulawesi Selatan.

Salah satu implikasi yang paling nyata adalah perubahan posisi Kedatuan Suppa setelah Islamisasi. Sebelum Islam berkembang, kedudukan Suppa lebih dikenal sebagai kerajaan maritim yang memiliki peranan penting dalam jaringan perdagangan di pesisir barat Sulawesi Selatan. Setelah Islam diterima sebagai agama kerajaan, posisi tersebut semakin menguat karena Suppa menjadi bagian dari jaringan politik kerajaan-kerajaan Islam di kawasan Sulawesi Selatan⁷⁸. Identitas sebagai kerajaan Islam memperluas ruang diplomasi Kedatuan Suppa dengan kerajaan-kerajaan lain yang telah lebih dahulu menerima Islam, sehingga pengaruh politiknya tidak lagi hanya didasarkan pada kekuatan ekonomi, tetapi juga pada kesamaan identitas keagamaan.

Perubahan posisi tersebut turut memengaruhi orientasi kebijakan politik kerajaan. Kedatuan Suppa mulai menempatkan nilai-nilai Islam sebagai bagian dari kebijakan pemerintahan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip adat Bugis yang telah berkembang sebelumnya. Integrasi antara adat dan syariat menjadikan Suppa sebagai

⁷⁸Leonard Y. Andaya, *The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi in the Seventeenth Century* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1981), 25–41, 50–63.

salah satu kerajaan yang mampu mempertahankan stabilitas politik di tengah perubahan sosial yang terjadi pada abad XVII. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Islamisasi tidak melemahkan eksistensi kerajaan, tetapi justru memperkuat legitimasi politik dan memperluas pengaruhnya dalam jaringan kekuasaan regional.

Transformasi politik Kedatuan Suppa juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan kawasan Ajatappareng. Sebagai salah satu anggota konfederasi tersebut, perubahan politik yang terjadi di Suppa ikut memengaruhi pola hubungan antarkerajaan di dalamnya⁷⁹. Kesamaan agama di antara kerajaan-kerajaan Ajatappareng memperkuat kerja sama dalam bidang diplomasi, perdagangan, dan pertahanan. Selain itu, Islam menjadi landasan etis dalam membangun hubungan politik sehingga proses musyawarah dan penyelesaian konflik antarkerajaan semakin dipengaruhi oleh nilai-nilai keadilan dan persaudaraan yang diajarkan dalam Islam.

Pengaruh tersebut semakin terlihat melalui berkembangnya sistem pemerintahan yang mengintegrasikan adat dan syariat di lingkungan kerajaan-kerajaan Ajatappareng. Kehadiran lembaga seperti Parewa Syara' dan Qadhi di berbagai kerajaan menunjukkan bahwa transformasi politik yang berlangsung di Suppa merupakan bagian dari perubahan yang lebih luas dalam kawasan Ajatappareng. Meskipun setiap kerajaan memiliki karakteristik politik yang berbeda, proses islamisasi mendorong terbentuknya pola pemerintahan yang relatif seragam dalam mengakomodasi kepentingan adat dan agama. Dengan demikian, Kedatuan Suppa memiliki kontribusi penting dalam dinamika politik regional pada masa tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, transformasi politik Kedatuan Suppa turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan politik masyarakat Bugis. Islamisasi tidak menghapus nilai-nilai politik Bugis seperti siri', lempu', getteng, dan musyawarah, tetapi memberikan landasan moral baru yang memperkuat pelaksanaan nilai-nilai tersebut. Konsep kepemimpinan mengalami perkembangan dari sekadar

⁷⁹Ahmad Yani, "Islamisasi di Ajatappareng Abad XVI–XVII," *Pusaka: Jurnal Khazanah Keagamaan* 8, no. 2 (2020): 151–160.

pemimpin adat menjadi pemimpin yang juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ajaran Islam. Perubahan ini kemudian memengaruhi perkembangan budaya politik Bugis pada kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan, terutama dalam hal legitimasi kekuasaan dan hubungan antara penguasa dengan masyarakat.

Kontribusi tersebut juga tercermin dalam berkembangnya model pemerintahan yang mengutamakan keseimbangan antara otoritas politik dan otoritas keagamaan. Integrasi antara lembaga adat dan lembaga syariat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial tanpa menghilangkan fondasi budaya lokal. Model seperti ini kemudian menjadi salah satu ciri penting dalam perkembangan kerajaan-kerajaan Bugis pascailamisasi dan memperlihatkan bahwa Islam diterima melalui proses dialog budaya, bukan melalui penghapusan sistem politik yang telah ada sebelumnya.

Transformasi politik Kedatuan Suppa memiliki relevansi yang besar dalam kajian sejarah lokal maupun sejarah Islam di Nusantara. Sejarah lokal Kedatuan Suppa menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Indonesia tidak berlangsung secara seragam, melainkan mengikuti karakteristik sosial, budaya, dan politik masing-masing daerah. Pengalaman Kedatuan Suppa membuktikan bahwa islamisasi dapat berjalan melalui jalur perdagangan, diplomasi, dakwah, dan akulturasi budaya sehingga menghasilkan bentuk pemerintahan yang khas⁸⁰. Oleh karena itu, kajian mengenai Kedatuan Suppa memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman mengenai proses islamisasi di Nusantara yang berlangsung secara damai dan adaptif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa transformasi politik Kedatuan Suppa memiliki implikasi yang luas dalam sejarah Sulawesi Selatan maupun sejarah Islam Nusantara. Perubahan posisi politik kerajaan setelah Islamisasi, pengaruhnya terhadap perkembangan Ajatappareng, kontribusinya terhadap budaya politik Bugis, serta relevansinya dalam kajian sejarah lokal menunjukkan bahwa

⁸⁰Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Jakarta: Kencana, 2013), 1–35.

Kedatuan Suppa merupakan salah satu contoh penting keberhasilan integrasi antara adat dan Islam. Dengan demikian, dinamika politik Kedatuan Suppa pascailamisasi tidak hanya menjadi bagian dari sejarah lokal Sulawesi Selatan, tetapi juga memberikan sumbangan yang berarti dalam memahami proses pembentukan peradaban Islam di Indonesia secara lebih komprehensif.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Proses islamisasi di Kedatuan Suppa pada abad XVII berlangsung secara bertahap melalui jalur perdagangan, dakwah, hubungan diplomatik, serta interaksi antara elite kerajaan dengan ulama dan pedagang Muslim. Posisi strategis Kedatuan Suppa sebagai wilayah pesisir mempercepat penerimaan Islam oleh Datu Suppa dan masyarakat sehingga Islam berkembang secara damai.
2. Dinamika politik pasca islamisasi ditandai oleh transformasi sistem pemerintahan dan legitimasi kekuasaan melalui integrasi nilai-nilai Islam dengan adat Bugis. Kehadiran lembaga seperti Parewa Syara' dan Qadhi memperkuat pelaksanaan pemerintahan, sementara konsep legitimasi adat tetap dipertahankan melalui proses adaptasi dan akulturasi.
3. Dampak islamisasi terhadap politik Kedatuan Suppa terlihat pada menguatnya legitimasi moral penguasa, meningkatnya peran ulama dalam pemerintahan, serta terbentuknya sistem politik yang lebih terintegrasi antara adat dan syariat. Secara teoritis, perubahan tersebut dapat dijelaskan melalui teori islamisasi, teori fungsionalisme struktural, dan teori akulturasi yang menunjukkan bahwa transformasi politik berlangsung secara dinamis tanpa menghilangkan identitas lokal masyarakat Bugis..

B. Saran

Penelitian mengenai dinamika politik Kedatuan Suppa pasca islamisasi masih memiliki ruang yang luas untuk dikembangkan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memanfaatkan lebih banyak sumber primer, seperti lontaraq, arsip kolonial, naskah lokal, serta tradisi lisan masyarakat, sehingga rekonstruksi sejarah yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan mendalam.

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan kajian sejarah politik lokal, khususnya mengenai hubungan antara islamisasi, perubahan struktur pemerintahan, dan sistem legitimasi kekuasaan di kerajaan-kerajaan Bugis maupun kawasan Nusantara lainnya. Kajian komparatif antara Kedatuan Suppa dan kerajaan-kerajaan lain di Konfederasi Ajatappareng juga perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika politik regional pada abad XVII.

Bagi pemerintah daerah, lembaga kebudayaan, dan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar dalam upaya pelestarian warisan sejarah dan budaya Kedatuan Suppa. Peningkatan dokumentasi, penelitian, publikasi ilmiah, serta pengembangan situs-situs sejarah di wilayah Suppa diharapkan mampu memperkuat identitas budaya lokal sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sejarah sebagai bagian dari pembangunan kebudayaan dan pendidikan di Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an Al-Karim.

A Hannan dan K Abdillah, "Hegemoni Religio-Kekuasaan dan Transformasi Sosial Mobilisasi Jaringan Kekuasaan dan Keagamaan Kyai dalam Dinamika Sosio-Kultural Masyarakat," *Sosial Budaya* 16, No. 1 (2019).

A Prayogi, "Pendekatan Kualitatif dalam Ilmu Sejarah," *Historia Madania* 5, No. 2 (2021)

A Yani dan A Zulfikar, "Penerimaan dan Perkembangan Islam di Kerajaan Suppa," *PUSAKA* 12, No. 2 (2024)

Abdul Azis, Nurul Ummisa, dan Muh Ardiansyah, "Integrasi Islam dalam Struktur Pemerintahan dan Kehidupan Sosial Kedatuan Suppa di Ajatappareng Abad 17 Masehi," *Batuthah: Jurnal Sejarah Padaban Islam* 4, No. 2 (2025).

Abdurrahman Dudung, "Metodologi Penelitian Sejarah Islam," *Ombak*, Yogyakarta 1 (2011).

Agustina, S., Iqbal, M., & Ismail, I. (2024). Antropologi Suku Bugis. *DAWUH: Islamic Communication Journal*, 5(2).

Khaeruddin, "Dinamika Politik Kerajaan-Kerajaan Lokal di Sulawesi Selatan: dari Persekutuan Diplomasi Hingga Konfrontasi Perebutan Superioritas (Abad XV–XVII)," *Yupa: Historical Studies Journal* (2022)

Ahmad Yani, "Islamisasi di Ajatappareng Abad XVI-XVII," *PUSAKA* 8, No. 2 (2020): 191–210, <https://doi.org/10.31969/Pusaka>.

Ahmad Yani, Ahmad Zulfikar, Susi Mako, dan Mirnanini, "Penerimaan dan Perkembangan Islam di Kerajaan Suppa Abad Ke-17," (2024).

Akhmad Rizqi Turama, "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons," *EUFONI: Journal Of Language, Literary And Cultural Studies* 2, No. 1 (2020)

Amir, M. (2015). Persekutuan Lima Ajatappareng di Sulawesi Selatan Abad ke-16. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*.

Andhika, MR, Hamdi, S., Jailani, J., Suroto, S., Ajidan, A., & Syahputra, R. (2024). Ulama, Madrasah dan Legitimasi Kekuasaan: Dinamika Otoritas Keilmuan dalam Sejarah Islam. *Moderasi: Jurnal Kerukunan Umat Beragama*.

Anthony Reid, *Southeast Asia In The Age Of Commerce 1450–1680, Volume Two: Expansion And Crisis* (New Haven: Yale University Press, 1993).

Anthony Reid, *Southeast Asia In The Age Of Commerce 1450–1680, Vol. I* (New Haven: Yale University Press, 1988).

As' Ad, M. (1994). Eksistensi Institusi Syara'dan Peranannya dalam Kehidupan Beragama Masyarakat di Kabupaten Soppeng. *Al-Qalam*.

Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Jakarta: Kencana, 2013).

Baharuddin, *Pengantar Sosiologi* (Sanabil, 2021).

Christian Pelras, *Manusia Bugis* (Jakarta: Nalar Dan Forum Jakarta-Paris, 2006).

Christian Pelras, *The Bugis* (Oxford: Blackwell Publishers, 1996).

Clifford Geertz, *The Interpretation Of Cultures* (New York: Basic Books, 1973).

Clifford Geertz, *The Religion Of Java* (Chicago: University Of Chicago Press, 1960).

Darna, A. (2021). Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial Dan Implementasinya Dalam Hukum Keluarga. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*.

David Easton, *A Systems Analysis Of Political Life* (New York: John Wiley & Sons, 1965).

Dina Rahayu R, “Dampak Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz Terhadap Perkembangan Sosial Politik Islam (99-101 H/717-720 M).

Dudung, “Metodologi Penelitian Sejarah Islam.”

Ghoni, A. (2023). Penyelesaian Perkara Li'an Di Lingkungan Peradilan Agama Perspektif Hukum Islam. *Indo Green Journal*.

H Sulasman Dan M Hum, “Metodologi Penelitian Sejarah,” *Bandung: Pustaka Setia*, 2014.

Iman, R. Q., & Joni, S. H. I. (2024). *KEKUASAAN YUDIKATIF DALAM ISLAM Qadha, Tahkim, Mazhalim Dan Hisbah*. Wawasan Ilmu.

Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)* (Jakarta: GP Press, 2018).

- J P Roszi dan M Mutia, "Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Keagamaan," *FOKUS* 3, No. 2 (2018)
- K Khaeruddin, "Dinamika Politik Kerajaan–Kerajaan Lokal di Sulawesi Selatan," *Yupa: Historical Studies Journal* 6, No. 2 (2022).
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003).
- Leonard Y Andaya, *The Heritage Of Arung Palakka: A History Of South Sulawesi In The Seventeenth Century* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1981).
- M I Majid dan A R Yunus, "Perkembangan Islam di Kedatuan Suppa Abad ke-17," *CARITA* 2, No. 1 (2023).
- M Mardia dan S Febriani, "Sejarah Awal Perkembangan Islam di Indonesia," *The International Journal Of Pegon: Islam Nusantara Civilization*.
- Marti Widiya dan Alimni Alimni, "Sejarah Sosial Pendidikan di Dunia Islam Proses Islamisasi dan Penyebaran Islam di Nusantara," *JPT: Jurnal Pendidikan Tematik* 4, No. 1 (2023).
- Mattulada, *Latoa: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1985), 187–203; Christian Pelras, *The Bugis* (Oxford: Blackwell Publishers, 1996).
- Metodologi Sejarah Kuntowijoyo, "Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta: PT," *Tiara Wacana*, 2013.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015).
- Mochamad Faidlul Abrori dan Mohammad Rofiq, "Hubungan Struktur dan Fungsi dalam Kehidupan Sosial:(Tinjauan Teori Fungsional Struktural)," *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10, No. 1 (2026).
- Muh. Ilham Majid, Abd. Rahim Yunus, Dan Wahyuddin, "Perkembangan Islam Di Kedatuan Suppa Abad Ke-17," (2023).
- Muhammad Amir Et Al., "Conflict And Power Relations On Ajatappareng 1905-1942," *Seminar Series In Humanities And Social Sciences* 1, No. 1 (2019).
- Muhammad Amir, "Persekutuan Lima Ajatappareng di Sulawesi Selatan Abad ke-16," *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 1, No. 2 (2015).

- Nurkidam, N., Sewang, A. M., Pababbari, M., & Syamsuddin, D. (2020). Leadership in the Kingdom of Mandar. *Journal of Research and Multidisciplinary*.
- Rahmani, I., & Sayuti, H. (2025). Integrasi Nilai Islam dan Budaya Lokal Terhadap Hak Asuh Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*.
- Rifai, A., Iskandar, I., & Wahab, A. (2025). Hukum Mandre Ade'dalam Suku Bugis Perspektif Hukum Islam (Desa Kalobba Kab. Sinjai): Mandre Ade'Law In The Bugis Tribe From Islamic Legal Perspective (Kalobba Village, Sinjai Regency). *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*.
- Rofia Masrifah, "Perkembangan Pendidikan Islam Masa Awal di Pulau Sulawesi," *JB I: Jurnal Bahasa Indonesia* 2, No. 1 (2024).
- Salim, S. (2024). Jaringan Teluk Bone: Aktivitas Pelayaran dan Diaspora Bugis Abad XVIII—XIX. *JAWI*.
- Samuel P. Huntington, *Political Order In Changing Societies* (New Haven: Yale University Press, 1968).
- Seventeenth Century* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1981).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020).
- Talcott Parsons, *The Social System* (New York: Free Press, 1951).
- George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, Ed. Ke-8 (Jakarta: Kencana, 2014).
- Y Nurcahya Et Al., "Jejak Islam dan Kekuasaan di Indonesia Dalam Konteks Politik Asia Tenggara," *Nusantara: Journal For Southeast Asian Islamic Studies* 21, No. 2 (2025).
- Yakub, A. (2019). Dinamika Politik Bugis Sulawesi Selatan: Kesenambungan Dan Perubahan Terhadap Politik Desentralisasi. *Ghazali Shafie Graduate School Of Government, Universiti Utara Malaysia*.
- Yudistira, F. F., Fidlan, A., Karni, A., & Ashadi, A. (2023). Pemangku Adat Koto Majidin Berperan dalam Pemberdayaan Masyarakat Muslim. *Dakwatul Islam*.
- Yunus, Y., & Mukhoyyaroh, M. (2021). Kedatuan Luwu: Nilai-Nilai To Accana Luwu. *Muqoddima: Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*.





DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
NOMOR : B- 2238 /In.39/FUAD.03/PP.00.9/9/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2025
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 25 September 2025 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2025
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: B-2238 /In.39/FUAD.03/PP.00.9/9/2025 Tahun 2025, tanggal 25 September 2025 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan
- Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2025
 - Menunjuk saudara: **Dr. Ahmad Yani, M. Hum.**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
Nama Mahasiswa : MUH. ARDIANSYAH
NIM : 2220203880230001
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Judul Penelitian : TRADISI MAPPALILI PADA ARAJANGNGE DALAM MEREKATKAN PERSAUDARAAN DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG
 - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare

Pada tanggal 25 September 2025

Dekan.



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.

NIP 196412311992031045





8e662d964c5eb17a_Turnitin

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpare.ac.id Internet	2254 words — 10%
2	repository.syekhnrjati.ac.id Internet	242 words — 1%
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	201 words — 1%
4	repository.uinsaizu.ac.id Internet	181 words — 1%
5	Abdul Azis, Nurul Ummisa, Muh. Ardiansyah. "Integrasi Islam Dalam Struktur Pemerintahan Dan Kehidupan Sosial Kedatuan Suppa Di Ajatappareng Abad 17 Masehi", Batutah: Jurnal Sejarah Padaban Islam, 2025 Crossref	145 words — 1%
6	Elizabeth Morrell. "Strengthening the Local in National Reform: A Cultural Approach to Political Change", Journal of Southeast Asian Studies, 2001 Crossref	124 words — 1%
7	ejurnal.iainpare.ac.id Internet	114 words — < 1%
8	ahmadruss12.blogspot.com Internet	69 words — < 1%
9	asianpublisher.id Internet	64 words — < 1%
10	etheses.uin-malang.ac.id Internet	62 words — < 1%
11	scholar.archive.org Internet	54 words — < 1%

BIOGRAFI PENULIS



Muh. Ardiansyah lahir di Marabombang pada tanggal 8 Agustus 2003. Penulis merupakan putra dari pasangan Ismail Muhtar dan Mariana Janna. Penulis memeluk agama Islam dan berasal dari Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan formal penulis diawali di SD Negeri 168 Kecamatan Suppa dan berhasil diselesaikan pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Suppa dan lulus pada tahun 2018. Setelah itu, penulis menempuh pendidikan di MA Attaqwa DDI Jampue dan menyelesaikannya pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan dan organisasi. Penulis pernah menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam (HM-PS SPI) periode 2024–2025. Selain itu, penulis juga aktif di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (DEMA FUAD) dengan amanah sebagai Koordinator Sumber Daya Mahasiswa (SDM). Penulis juga mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kadingeh, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang dan di amanahkan sebagai Koordinator Desa. Penulis juga pernah mengemban amanah sebagai Ketua Umum Kesatuan Pelajar Mahasiswa Pinrang (KPMP) Cabang Suppa. Melalui organisasi tersebut, penulis memperoleh pengalaman dalam bidang kepemimpinan, pengelolaan organisasi, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan kapasitas mahasiswa. Selain aktif berorganisasi, penulis juga memiliki ketertarikan pada kajian sejarah Islam, sejarah lokal Sulawesi Selatan, serta dinamika politik kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Minat tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai sejarah Kedatuan Suppa sebagai salah satu kerajaan penting di kawasan Ajatappareng. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora

(S.Hum.) pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, penulis menyusun skripsi yang berjudul "Transformasi Politik Kedatuan Suppa Pasca Islamisasi Abad XVII." Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian sejarah lokal, khususnya mengenai dinamika politik Kedatuan Suppa setelah proses islamisasi, serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

